



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN KOTA PARIAMAN 2017



KATA PENGANTAR

Terimakasih kami ucapkan untuk dukungan berbagai pihak sebagai penghimpun data, pengolah data, penyusun analisis, dan penyaji Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kota Pariaman 2017.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman 2017 memberikan gambaran keadaan kependudukan kota Pariaman dalam kurun waktu tahun 2016. Gambaran kependudukan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data bagi semua stakeholder yang membutuhkan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara umum untuk Kota Pariaman. Gambaran kondisi kependudukan Kota Pariaman dalam profil ini meliputi kuantitas, mobilitas dan persebaran penduduk.

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Buku Profil Kependudukan Kota Pariaman Tahun 2017 masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam data maupun bahasa, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pariaman

ttd

Drs. Sumiramis

NIP. 19611113 198601 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian Umum	3
E. Sumber data	12
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN	13
A. Letak Geografis	14
B. Kondisi Demografis	15
C. Pemerintahan	15
D. Pendidikan	15
E. Visi Misi	16
BAB III PERKEMBANGAN KUANTITAS PENDUDUK	17
A. Jumlah dan Persebaran Penduduk	17
1. Jumlah Penduduk	17
2. Kepadatan Penduduk	19
3. Laju Pertumbuhan Penduduk	20
B. Penduduk menurut Karakteristik Demografi	21
1. Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin, Piramida Penduduk dan Rasio Ketergantungan	21
C. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial	26
1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	26
2. Komposisi Penduduk menurut Agama	28

	3.	Komposisi Penduduk menurut Status Kawin	29
	4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan	33
	D.	Profil Kependudukan dari Aspek Keluarga		34
	1.	Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	34
	2.	Jumlah Penduduk menurut Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	35
	3.	Karakteristik Kepala Keluarga	37
Bab IV		KUALITAS PENDUDUK	47
	A.	Indikator Kesehatan	47
	1.	Kelahiran	47
	2.	Kematian	49
	B.	Indikator Pendidikan	53
	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	54
	2.	Angka Partisipasi Murni (APM)	55
	3.	Angka Putus Sekolah	55
	C.	Indikator Ekonomi	56
	1.	Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja	56
	2.	Angka Pengangguran	61
	D.	Indikator Sosial	65
	1.	Pekarja Anak	65
	2.	Penduduk penerima Jaminan Kesehatan Nasional	65
	3.	Mobilitas Penduduk	66
Bab V		KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	68
	A.	Kepemilikan Kartu Keluarga	68
	B.	Perekaman KTP Elektronik	69
	C.	Kepemilkan Akta	70
	1.	Akta Kelahiran	70
	2.	Akta Perkawinan	72
	3.	Akta Perceraian	73
Bab VI		KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	75
	A.	Kesimpulan	75
	1.	Aspek Kuantitas Penduduk	77
	2.	Aspek Kualitas Penduduk	80

3. Aspek Kepemilikan Dokumen	80
4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan	82
B. Implikasi Kebijakan	84
1. Kebijakan akurasi dan validasi kependudukan	84
2. Kebijakan Pengarusutamaan Pemanfaatan Data Kependudukan	85
3. Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk	85
4. Kebijakan Penataan Ruang dan Penyediaan Sarana Prasarana Kota Berwawasan Kependudukan	86
5. Kebijakan Ketahanan Pangan	86
6. Kebijakan kesehatan	86
7. Kebijakan pendidikan	87
8. Kebijakan ketenagakerjaan	87
9. Kebijakan sosial	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan penduduk. Aspek kependudukan secara fungsional membentuk satu kesatuan ekosistem wilayah. Oleh karena itu informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai indikator *outcome* dari semua program kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Profil perkembangan kependudukan menyajikan informasi yang dapat dikaji untuk kepentingan perencanaan pembangunan, pilihan prioritas pagu indikatif pembangunan, rencana tindak penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan model kelembagaan demokrasi.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Profil Perkembangan Data Kependudukan Kota Pariaman tahun 2016, adalah bertujuan untuk menyajikan data dan memberikan informasi perkembangan kependudukan kota Pariaman tahun 2016, supaya dapat dimanfaatkan secara umum sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan, dan perencanaan tolok ukur kinerja pembangunan daerah. Secara khusus pemanfaatan informasi perkembangan kependudukan tahun 2016 untuk rujukan data:

- 1) Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kota
- 2) Perencanaan kebijakan kependudukan daerah

- 3) Penentuan target kinerja luaran dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program pembangunan *pro poor*, *pro job*, dan *pro growth* dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan daerah.
- 4) Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik dan jaminan sosial
- 5) pengembangan kelembagaan partisipasi pembangunan masyarakat

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2010, ruang lingkup profil Perkembangan Kependudukan Kota Pariaman tahun 2017 memuat diskripsi data dan analisis implikasi atas data:

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk; jumlah komposisi dan persebaran penduduk; penduduk menurut karakteristik demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk, menampilkan data mobilitas permanen (migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto, migrasi bruto), mobilitas non permanen, dan urbanisasi (persentase penduduk kota; rasio kota dan desa).
4. Kepemilikan dokumen kependudukan: kepemilikan KK, KTP, Akta (kelahiran; perkawinan; perceraian; kematian; pengakuan anak), surat dan keterangan orang terlantar.

Analisis data profilkependudukankotaPariamantahun 2017 menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi daerah dan implikasinya bagi perencanaan pembangunan daerah (target luaran, sasaran program); Perencanaan kebijakan kependudukan daerah; penentuan target kinerja luaran dan sasaran program pembangunan daerah; penentuan target kinerja luaran dan sasaran program pembangunan daerah terkait pengarusutamaan program pembangunan *pro poor*, *pro job*, dan *pro growth* dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan daerah; Pengembangan penyelenggaraan pelayanan public dan jaminan sosial; dan pengembangan kelembagaan partisipasi pembangunan masyarakat.

D. Pengertian Umum

1. Penduduk

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

2. Kependudukan

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;

3. Perkembangan kependudukan

Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Data kependudukan

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

5. Profil Perkembangan Kependudukan

Profil perkembangan kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;

6. Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

7. Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;

8. **Kualitas Penduduk**

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;

9. **Mobilitas Penduduk**

Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah kabupaten/kota;

10. **Persebaran Penduduk**

Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;

11. **Kematian atau mortalitas menurut WHO**

Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;

12. **Mobilitas penduduk permanen (migrasi)**

Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);

13. **Mobilitas penduduk non permanen (*circulation/sirkuler*)**

Mobilitas penduduk non permanen (*circulation/sirkuler*) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;

14. **Penduduk Musiman**

Penduduk Musiman merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domilisinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;

15. Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*)

Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (*commuting*) adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;

16. Migrasi kembali/datang (*return migration*)

Migrasi kembali/datang (*return migration*) adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;

17. Migrasi semasa hidup (*life time migration*)

Migrasi semasa hidup (*life time migration*) adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;

18. Migrasi Risen (*recent migration*)

Migrasi Risen (*recent migration*) adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;

19. Urbanisasi

Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perKabupatenan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perKabupatenan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perKabupatenan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya;

20. Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;

21. Penduduk yang termasuk angkatan kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak

bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.

22. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.

23. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

24. Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja

Punya pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

25. Angka partisipasi angkatan kerja

Angka partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;

26. Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka

Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.

27. Sekolah

Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.

28. Mengurus rumah tangga

Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.

29. Kegiatan lainnya

Kegiatan lainnya adalah mereka yang sudah pensiun, orang-orang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan suatu pekerjaan.

30. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

31. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

32. Lapangan usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja/perusahaan/kantor dimana seseorang bekerja.

33. Jenis pekerjaan/jenis jabatan

Jenis pekerjaan/jenis jabatan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang termasuk golongan bekerja atau orang-orang yang sementara tidak bekerja, yang dibagi menjadi 8 golongan besar yaitu : 1) tenaga profesional, teknisi dan sebagainya; 2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3) tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis; 4) tenaga usaha penjualan; 5) tenaga usaha jasa; 6) tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan; 7) tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja kasar; 8) lainnya.

34. Upah/gaji bersih

Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan dan lain-lain.

35. Status pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

36. Angka pengangguran

Angka pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;

37. Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;

38. Lahir hidup

Lahir hidup adalah

- a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan otot;
- b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;

39. Lahir mati

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;

40. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;

41. Angka Kematian Bayi Baru Lahir

Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;

42. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir

Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir(usia 1-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;

43. Angka Kematian Bayi/IMR

Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;

44. Angka Kematian Ibu/MMR

Angka Kematian Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;

45. Angka Kematian Kasar

Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;

46. Pengeluaran untuk makanan

Pengeluaran untuk makanan adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan);

47. Penduduk Melek Huruf

Penduduk Melek Huruf adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;

48. Angka Partisipasi Total

Angka Partisipasi Total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu umur 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 tahun;

49. Angka Partisipasi Murni/APM

Angka Partisipasi Murni/APM adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;

50. Angka Partisipasi Kasar/APK

Angka Partisipasi Kasar/APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;

51. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto;

52. Angka Pertumbuhan Penduduk

Angka Pertumbuhan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;

53. Proporsi penduduk

Proporsi penduduk adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokkan tertentu, seperti umur dan jenis kelamin;

54. Rasio jenis kelamin

Rasio jenis kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;

55. Piramida penduduk

Piramida penduduk adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;

56. Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;

57. Rasio kepadatan penduduk

Rasio kepadatan penduduk adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;

58. Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;

59. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;

60. Angka Perceraian Kasar

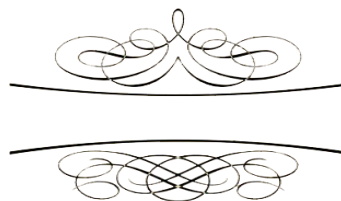
Angka Perceraian Kasar adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu;

61. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu

E. Sumber Data

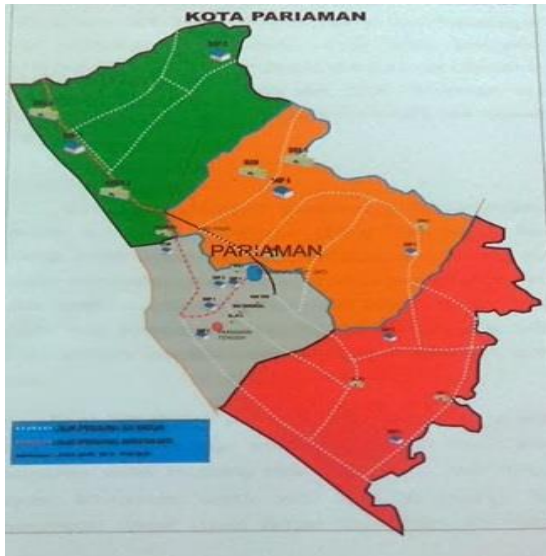
1. Data dan Informasi Kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini bersumber dari Database Kependudukan Kota Pariaman yang telah dibersihkan oleh Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berasal dari data registrasi penduduk dan Pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) keadaan per 31 Desember 2016.
2. Data yang berasal dari lintas sektoral terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Dinas KP2TPM dan Bappeda Kota Pariaman.



BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN

Gambar 2.1. Peta Kota Pariaman



Kota Pariaman yang dikenal dengan sebutan “Kota Tabuik” terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman mempunyai luas wilayah 73,36 km². Terdiri atas 4 (empat) kecamatan, 55 Desa dan 16 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur.

Kecamatan Pariaman Utara merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 23,35 Km² atau 33,63 persen dari luas Kota Kota Pariaman, sedangkan Kecamatan Pariaman Tengah merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 16,68 Km² tetapi memiliki Populasi terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan lain karena Pusat Kota dan Pusat Pemerintahan terletak di Kecamatan Pariaman Tengah. Kota Pariaman juga identik dengan Kota yang dikelilingi pantai, rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari permukaan laut. Secara keseluruhan panjang garis pantai yang dimiliki adalah sepanjang 12 Km², kecuali Kecamatan Pariaman Timur, semua Kecamatan memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut.

Kota Pariaman memiliki Pantai landai dengan Pesona yang indah antaranya dikenal dengan Pantai Gondoriah merupakan salah satu tempat rekreasi, tempatnya asri dan rindang karena dikelilingi oleh Pohon-pohon cemara yang menyejukan, beralokasi di depan stasisun kereta Api Pariaman, sehingga memudahkan para wisatawan khususnya dari Kota Padang berkunjung untuk menikmati suasana pantai, Pantai Gondoriah tengah diperbaiki dengan sarana dan prasarana seperti enjungan, Pajasera Plaza Gondoriah, Darmaga Apung, Monumen perjuangan TNI-AL Gondorian Bridge dan jampatan Muaro. Juga tempat reareasi lainnya seperti Pantai

Kata – Taluk, Monumen ikan di Karan aur – Pasir Lohong, dengan Tamam Anas Malik, Pantai Cermin di Karan Aur Rawa Mati di di Manggung Pantai belibis di Naras, Naras juga terkenal dengan kerajinan tangan bordiran Kota Pariaman juga memiliki pusat penangkapan Penyu pertama di Sumatera Barat di Apar. Kecamatan Pariaman Utara.

Kota Pariaman berbagai macam ragam keindahan lautnya seperti adanya (6) enam buah pulau pulau kecil yang tidak ada penghuninya diantaranya Pulau Angso Duo, Pulau Tengah, Pulau Ujung, Pulau Gosong dan Pulau Bando, Pulau Kasiak yang terkenal dengan pasir putihnya kita bisa mikmatisuasana disana, dengan memakai alat tranportasi yang telah tersedia.

A. LetakGeografi

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut dengan luas daratan 73,36 km² dengan panjang pantai ± 12,7 km serta luas perairan laut 282,69 km².

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam. Kota Pariaman berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan Kecamatan :

Utara	kecamatan V Koto Kampung Dalam, kabupaten Padang Pariaman
Selatan	kecamatan Nan Sabaris, kabupaten Padang Pariaman
Barat	Samudera Hindia
Timur	kecamatan VII Koto Sungai Sarik, kabupaten Padang Pariaman

B. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2016 sesuai dengan hasil Konsolidasi Data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2016 adalah 88.717 jiwa, terdiri dari 44.714 jiwa laki-laki dan 44.003 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin Kota Pariaman 101,62 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dikaitkan dengan kelompok umur, nampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok manula perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya manula perempuan lebih tidak sejahtera dibandingkan dengan manula laki-laki.

C. Pemerintahan

Kota Pariaman resmi berdiri sebagai kota otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kota ini berstatus *kota administratif* dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam dengan Walikota pertamanya Drs. Adlis Legan (1987-1993).

Kota Pariaman terdiri atas empat kecamatan:

- Pariaman Tengah memiliki 16 Kelurahan dan 6 Desa
- Pariaman Utara memiliki 17 Desa
- Pariaman Selatan memiliki 16 Desa
- Pariaman Timur memiliki 16 Desa

D. Pendidikan

Di Kota Pariaman terdapat 7 Perguruan Tinggi Swasta, menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Dengan ketersediaan sumber daya manusia pembangunan yang berkualitas akan mempercepat perkembangan pembangunan Kota Pariaman.

E. Visi Misi

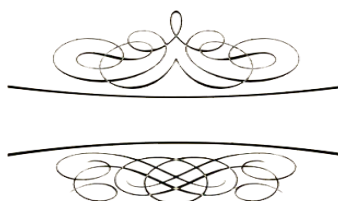
Pembangunan daerah di Kota Pariaman menuntut berkelanjutan, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Hal tersebut mengacu kepada visi RPAD 2009-2013 Kota Pariaman “Kota Tujuan Wisata Budaya yang Islami” menuju visi RPJP Kota Pariaman yaitu “mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota perdagangan dan jasa di wilayah pesisir barat Sumatera Barat ”Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman mempunyai visi dan misi.

VISI

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Pariaman

MISI

1. Melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai aturan.
2. Melaksanakan pelayanan penertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara optimal.
3. Membangun dan menyediakan database kependudukan yang akurat dan up to date.
4. Meningkatkan kemampuan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang professional dalam pelayanan administrasi kependudukan.



BAB III PERKEMBANGAN KUANTITAS PENDUDUK

Bab ini akan mendiskripsikan dan menganalisis perkembangan kuantitas penduduk Kota Pariaman tahun 2016, mencakup tentang:

1. Jumlah dan persebaran penduduk, meliputi: jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/kelurahan; kepadatan penduduk; laju pertumbuhan penduduk;
2. Penduduk menurut karakteristik demografi, meliputi:
 - a) Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, yaitu rasio jenis kelamin, piramida penduduk, rasio ketergantungan;
 - b) Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin, meliputi: angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum, angka perkawinan menurut kelompok umur, rata-rata umur kawin pertama, angka perceraian kasar, angka perceraian umum.
 - c) Keluarga, meliputi: jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga; hubungan dengan kepala keluarga; karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur; karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin; karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin; karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan; karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
 - d) Penduduk menurut karakteristik sosial, meliputi: jumlah penduduk menurut pendidikan; pendidikan tertinggi yang ditamatkan; jumlah penduduk menurut agama; jumlah penduduk menurut kecatata.
 - e) Kelahiran, meliputi: jumlah kelahiran; angka kelahiran kasar.
 - f) Kematian, meliputi: jumlah kematian; angka kematian kasar.

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Kota Pariaman dengan luas wilayah 73,36 km² didiami penduduk sebanyak 86.828 jiwa, terdiri dari 44.714 jiwa laki-laki dan 44. 003 jiwa perempuan, Penduduk ini tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan dan Pariaman Timur. Dari tabel

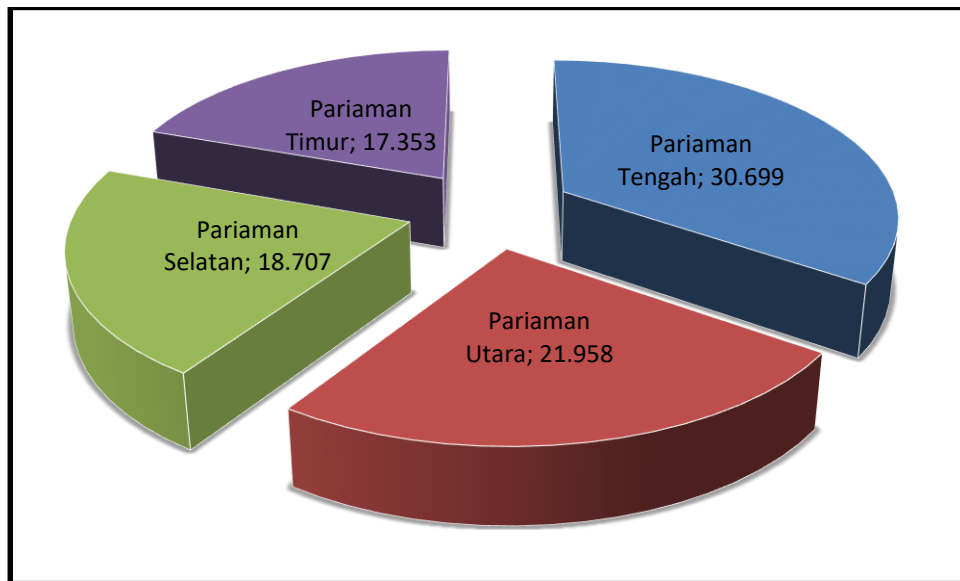
3.1 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah yaitu 30.699 jiwa (34,60%), sedangkan Kecamatan Pariaman Timur memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 17.353 jiwa (19,56%).

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
	n	%	n	%	n	%
01-Pariaman Tengah	15.516	34,70	15.183	34,50	30.699	34,60
02-Pariaman Utara	11.055	24,72	10.903	24,78	21.958	24,75
03-Pariaman Selatan	9.478	21,20	9.229	20,97	18.707	21,09
04-Pariaman Timur	8.665	19,38	8.688	19,74	17.353	19,56
Kota Pariaman	44.714	100,00	44.003	100,00	88.717	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Gambar 3.1 Grafik Penduduk Kota Pariaman Tahun 2016



2. Kepadatan Penduduk

Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960, ada (4) empat Klasifikasi Kepadatan Penduduk yaitu Tidak Padat, dengan tingkat kepadatan 1-50 jiwa/km², Kurang Padat dengan tingkat kepadatan 51-250 jiwa/km², Cukup Padat dengan tingkat kepadatan 251-400 jiwa/km² dan Sangat Padat dengan tingkat kepadatan lebih besar dari 401 jiwa/km².

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Pariaman tergolong Kota yang cukup padat, hal ini dapat di lihat pada tabel 3.2 dibawah ini. Tabel 3.2 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kota Pariaman. Dengan luas 74,36 km², Kota Pariaman didiami oleh 88.717 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 1.193,07 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km² Kota Pariaman didiami sebanyak 1.193 jiwa.

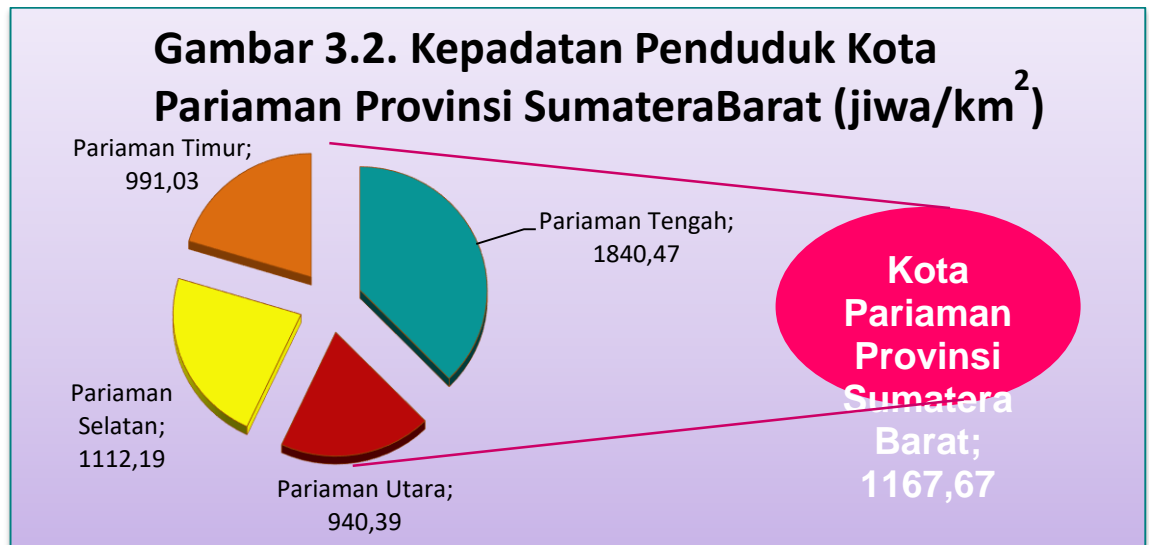
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk, Kota Pariaman Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Pariaman Tengah	30.699	16,68	1.840,47
Pariaman Utara	21.958	23,35	940,39
Pariaman Selatan	18.707	16,82	1.112,19
Pariaman Timur	17.353	17,51	991,03
Kota Pariaman	88.717	74,36	1.193,07

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Pariaman Tengah merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 1.840,47 jiwa/km², karena terletak di pusat Kota Pariaman, sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kecamatan Pariaman Utara yaitu sebesar 940,39 jiwa/km² karena memiliki daerah terluas dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Di bawah ini grafik kepadatan penduduk Kota Pariaman Tahun 2016



Jika dilihat dari grafik di atas persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Pariaman Tengah merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 1.840,47 jiwa/km², karena terletak di pusat Kota Pariaman, sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kecamatan Pariaman Utara yaitu sebesar 940,39 jiwa/km² karena memiliki daerah terluas dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis (yang meliputi kelahiran, kematian dan migrasi) serta faktor non demografi (seperti kesehatan dan tingkat pendidikan). Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Tabel 3.2. Angka Pertumbuhan Penduduk, Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		PERTAMBAHAN PENDUDUK	ANGKA PERTUMBUHAN PENDUDUK
	TAHUN 2015	TAHUN 2016		
01-PARIAMAN TENGAH	30.129	30.699	570	0,02
02-PARIAMAN UTARA	21.445	21.958	513	0,02
03-PARIAMAN SELATAN	18.259	18.707	448	0,02
04-PARIAMAN TIMUR	16.995	17.353	358	0,02
KOTA PARIAMAN	86.828	88.717	1.889	0,02

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Angka pertumbuhan penduduk Kota pariaman termasuk rendah. Selama kurun waktu Desember 2015 sampai dengan Desember 2016, pertumbuhan penduduk Kota Pariaman kurang dari satu persen yaitu hanya mencapai 0,02 persen. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan data hasil pembersihan oleh Kementerian Dalam Negeri yang telah diintegrasikan dengan data hasil perekaman KTP Elektronik. Pertumbuhan Penduduk yang rendah ini sangat menguntungkan Pemerintah Kota Pariaman, karena Kota Pariaman sendiri merupakan kota yang sudah cukup padat. Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya. Angka pertumbuhan penduduk diatas dipengaruhi oleh masih terdapatnya data ganda antar kabupaten/kota se-Indonesia yang terdeteksi oleh Tim Konsolidasi Data Kementerian Dalam Negeri sehingga banyak data ganda yang harus dihapus dari database kependudukan kabupaten/kota.

B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin, Piramida Penduduk dan Rasio Ketergantungan

Jumlah dan proporsi penduduk kota Pariaman menurut umur dan jenis kelamin digambarkan pada tabel 4.4. berikut ini.

Tabel. 3.4. Proporsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman, Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah		Kumulatif	RJK
	n	%	n	%	n	%		
0-4	2.893	6,47	2.634	5,99	5.527	6,23	5.527	1,10
5-9	4.032	9,02	3.753	8,53	7.785	8,78	13.312	1,07
10-14	4.345	9,72	3.728	8,47	8.073	9,10	21.385	1,17
15-19	4.562	10,20	4.203	9,55	8.765	9,88	30.150	1,09
20-24	4.597	10,28	4.256	9,67	8.853	9,98	39.003	1,08
25-29	3.721	8,32	3.361	7,64	7.082	7,98	46.085	1,11
30-34	3.745	8,38	3.414	7,76	7.159	8,07	53.244	1,10
35-39	3.223	7,21	2.979	6,77	6.202	6,99	59.446	1,08
40-44	2.838	6,35	2.857	6,49	5.695	6,42	65.141	0,99
45-49	2.566	5,74	2.688	6,11	5.254	5,92	70.395	0,95
50-54	2.339	5,23	2.429	5,52	4.768	5,37	75.163	0,96
55-59	1.967	4,40	2.206	5,01	4.173	4,70	79.336	0,89
60-64	1.479	3,31	1.779	4,04	3.258	3,67	82.594	0,83
65-69	933	2,09	1.206	2,74	2.139	2,41	84.733	0,77
70-74	614	1,37	906	2,06	1.520	1,71	86.253	0,68
>75	860	1,92	1.604	3,65	2.464	2,78	88.717	0,54
Jumlah	44.714	100,00	44.003	100,00	88.717	100,00		1,02

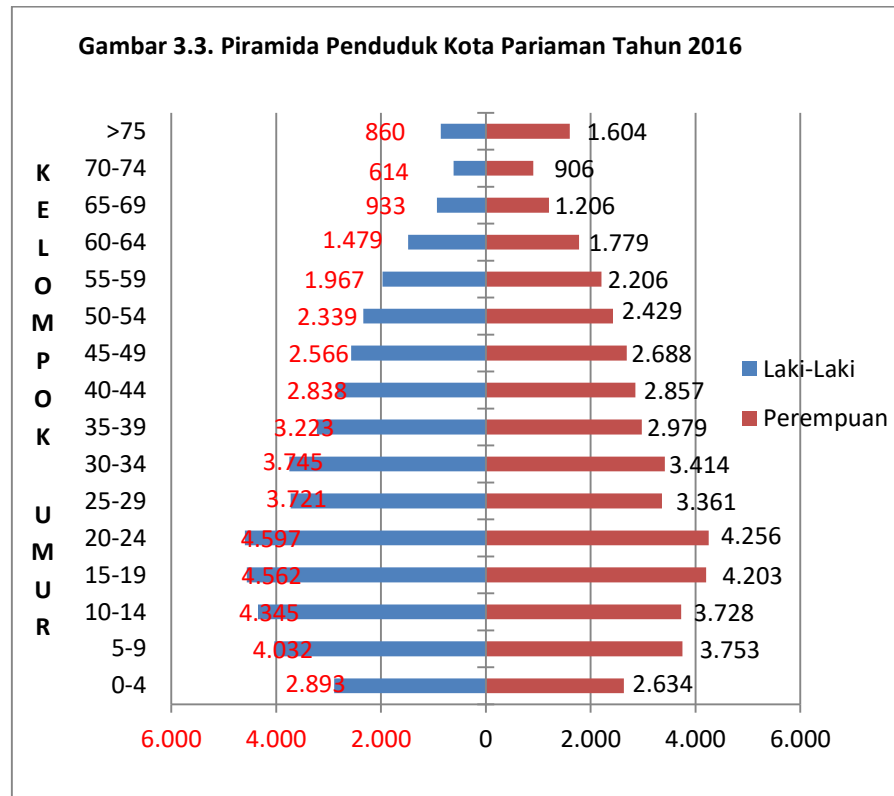
Sumber: Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dilihat dari tabel 3.4 di atas Proporsi perempuan hampir sama dengan Laki-Laki, berimplikasi pada kebijakan pembangunan berperspektif gender. Tantangan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (*Gender Empowerment Index*). Wanita merupakan sumber daya yang cukup potensial untuk mensukseskan program-program pembangunan. Meningkatnya peluang wanita memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dalam memperbaiki kemampuan ekonomi, dapat menekan jumlah kelahiran. Peningkatan pendidikan berarti akan menunda usia perkawinan. Sedangkan kesibukan wanita dalam rangka memperbaiki kemampuan ekonomi akan berpengaruh terhadap jumlah anak dalam setiap keluarga. Dengan demikian total usia reproduksi semakin sempit. Hal ini akan ikut mempertahankan fertilitas pada tingkat yang rendah, sehingga membantu

upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan karena kelahiran. Selain itu, tingkat pendidikan wanita juga cenderung berhubungan secara negatif dengan angka mortalitas, terutama mortalitas bayi dan ibu. Kebijakan afirmatif Kota Pariaman untuk memperluas akses perempuan mendapatkan peluang peningkatan pendapatan akan membantu mengurangi angka rasio ketergantungan penduduk Kota Pariaman, berarti meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan afirmatif pemerintah untuk meningkatkan peluang perempuan pada posisi pengambil keputusan di ranah jabatan publik, akan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) Kota Pariaman.

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar pula yaitu hampir seperempat penduduk Kota Pariaman (24,10%). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu bersaing memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi lain diharapkan Pemerintah Kota Pariaman harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 6,23% penduduk Kota Pariaman merupakan balita. Kondisi ini juga menuntut perhatian Pemerintah Kota Pariaman dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan.



Kota Pariaman menunjukkan struktur penduduk konstriktif (*constrictive*), dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok 15-19 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. kelompok umur ini adalah kelompok umur yang termasuk penduduk usia Sekolah dimana beberapa tahun yang akan datang termasuk kelompok Usia kerja. Mau tak mau Pemerintah Kota Pariaman harus membuka lapangan kerja yang lebih banyak untuk menghadapi ekonomi global pada saat ini. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran

yang terus bertambah. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 6,90 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk, maka penduduk Kota Pariaman termasuk dalam kategori penduduk *intermediate*. Dimana umur median penduduk Kota Pariaman tahun 2016 adalah 28,78 tahun, yang berarti setengah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2016 berusia di bawah 28 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 28 tahun. Dengan kata lain, penduduk Kota Pariaman dikategorikan sebagai penduduk tua (*old population*).

Struktur penduduk menurut umur juga menginformasikan besarnya tanggungan hidup bagi kelompok usia produktif. Dari kelompok usia produktif dan non produktif sebagai berikut.

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Kota Pariaman menurut Umur Muda, Umur Produktif dan Umur Tua, Kota Pariaman, Tahun 2016

Struktur Umur	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
	n	%	n	%	n	%
0-14 (Umur Muda)	11.270	25,20	10.115	22,99	21.385	24,10
15-64 (Umur Produktif)	31.037	69,41	30.172	68,57	61.209	68,99
65+ (Umur Tua)	2.407	5,38	3.716	8,44	6.123	6,90
Kota Pariaman	44.714	100,00	44.003	100,00	88.717	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dari Tabel 3.5 nampak bahwa 68,99 persen penduduk Kota Pariaman merupakan penduduk Usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal pembangunan, sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban

yaitu penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebesar 24,10 persen dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) sebesar 6,90 persen. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, jumlah penduduk usia produktif laki-laki lebih besar dari pada penduduk usia produktif perempuan.

Namun pada kelompok usia lanjut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan pada kelompok usia muda terlihat bahwa penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

C. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan seseorang untuk memiliki peluang lebih dalam persaingan tenaga kerja. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk semakin tinggi modal dasar pembangunan suatu daerah. Dengan demikian salah satu cara untuk meningkatkan kualitas penduduk agar menjadi modal dasar pembangunan adalah dengan memajukan bidang pendidikan. Dengan kata lain pendidikan sebagai *human investment* merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar jika tidak didukung dengan ketrampilan dan pengetahuan akan menjadi beban. Pertambahan jumlah penduduk usia sekolah setiap tahun merupakan beban berat yang harus dihadapi. Pertambahan penduduk usia sekolah tersebut menuntut tersedianya fasilitas-fasilitas pendidikan (sekolah, guru, buku, dsb). Profil penduduk Kota Pariaman menurut pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.6. Distribusi Penduduk Umur menurut Tingkat Pendidikan yang

Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman, Tahun 2016

JENJANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	n	%	n	%	n	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	9.420	21,07	8.677	19,72	18.097	20,40
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	6.069	13,57	5.774	13,12	11.843	13,35
TAMAT SD/SEDERAJAT	6.940	15,52	7.463	16,96	14.403	16,23
SLTP/SEDERAJAT	7.325	16,38	6.470	14,70	13.795	15,55
SLTA/SEDERAJAT	11.775	26,33	10.641	24,18	22.416	25,27
DIPLOMA I/II	199	0,45	735	1,67	934	1,05
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	594	1,33	1.174	2,67	1.768	1,99
DIPLOMA IV/STRATA I	2.200	4,92	2.939	6,68	5.139	5,79
STRATA II	187	0,42	126	0,29	313	0,35
STRATA III	5	0,01	4	0,01	9	0,01
KOTA PARIAMAN	44.714	100,00	44.003	100,00	88.717	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan periode Desember 2016 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan relatif cukup tinggi. Lebih dari seperempat penduduk Kota Pariaman (25,27%) tamat SLTA/Sederajat. Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian. persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Sebaliknya pada jenjang pendidikan dasar, proporsi penduduk yang tamat SD untuk penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Dari tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam mengenyam pendidikan telah berkembang dengan baik di Kota Pariaman. Lebih lagi persentase penduduk perempuan tamatan strata 1 (S1) lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dengan perempuan. Jika penduduk perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi tentunya ketergantungan terhadap laki-

laki bisa sedikit ditekan dan tentunya keinginan untuk bertahan hidup akan semakin tinggi bagi penduduk perempuan.

Pemerintah Kota Pariaman perlu memperhatikan kondisi di atas mengingat bahwa era globalisasi sebentar lagi akan berlangsung dan persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dimana warga negara asing pun bisa mencari pekerjaan ke Indonesia. Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus.

2. Komposisi Penduduk menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Penduduk Kota Pariaman pada umumnya memeluk agama Islam (99,62 persen), disusul kemudian pemeluk agama Kristen dan Katholik (0,38 persen). Penganut Aliran Kepercayaan hanya 5 orang (0,01 persen) sedangkan penganut agama Budha, Hindu, serta Konghucu tidak ada.

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Menurut Agama Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	ISLAM		KRISTEN		KATHOLIK		ALIRAN KEPERCAYAAN		TOTAL	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pariaman Tengah	30362	98,90	210	0,68	122	0,40	5	0,02	30.699	34,60
Pariaman Utara	21958	100,00	0	0,00	0	-	0	-	21.958	24,75
Pariaman Selatan	18707	100,00	0	0,00	0	-	0	-	18.707	21,09
Pariaman Timur	17349	99,98	4	0,02	0	-	0	-	17.353	19,56
Kota Pariaman	88.376	99,62	214	0,24	122	0,14	5	0,01	88.717	100

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Jika dikaitkan dengan wilayah kecamatan, maka agama islam mendominasi semua wilayah kecamatan di Kota Pariaman. Kecamatan

Pariaman merupakan wilayah agama Islam terbesar yaitu 30.362 jiwa, diikuti Kecamatan Pariaman Utara yaitu 21.975 jiwa.

Agama kedua terbesar setelah Islam adalah agama Kristen yang tersebar hanya di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Timur yang hanya satu Keluarga. Kecamatan Pariaman Tengah merupakan wilayah dengan agama Kristen dan Katholik terbesar karena banyak dihuni oleh penduduk dari Sumatera Utara, juga dari daerah Kepulauan Mentawai. Oleh karena Kota Pariaman merupakan Kota yang didominasi agama islam, maka sedikit yang menganut Aliran Kepercayaan yaitu hanya 5 orang yang merupakan keturunan dari Daerah di luar Kota Pariaman.

3. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan.

Tabel 3. 8. Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin Kota Pariaman Tahun 2016

STATUS KAWIN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6	7
BELUM KAWIN	26.729	59,78	21.186	48,15	47.915	54,01
KAWIN	17.103	38,25	18.034	40,98	35.137	39,61
CERAI HIDUP	353	0,79	894	2,03	1.247	1,41
CERAI MATI	529	1,18	3.889	8,84	4.418	4,98
KOTA PARIAMAN	44.714	100,00	44.003	100,00	88.717	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Status Kawin dari tabel 3.8 di atas terlihat bahwa kota Pariaman didominasi oleh penduduk berstatus belum kawin yakni 54,01%. Hal ini terlihat baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Proporsi penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan. Laki-laki dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan

keluarga, sehingga mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Status cerai hidup dan **cerai mati** memberi informasi bahwa proporsi penduduk perempuan berstatus cerai hidup (2,03%) jauh lebih besar daripada laki-laki (0,79%). Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian perempuan secara ekonomi dan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, membuat perempuan lebih berani mengambil resiko perceraian.

Cerai Mati, memberi informasi bahwa di kota Pariaman tahun 2016, penduduk dengan status janda (8,84%) lebih besar daripada status duda (1,18%). Hal ini mengindikasikan status kesehatan perempuan di Kota Pariaman lebih baik, sehingga usia harapan hidup perempuan lebih besar, dan resiko kematian laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 3.9. Distribusi Penduduk Menurut Status Kawin dan Kecamatan Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			ANGKA PERKAWINAN KASAR	ANGKA PERKAWINAN UMUM
	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN	STATUS KAWIN	UMUR >= 15		
PARIAMAN TENGAH	30315	12577	23383	241,04	185,92
PARIAMAN UTARA	21670	8549	16726	253,48	195,65
PARIAMAN SELATAN	18394	7187	14166	255,93	197,11
PARIAMAN TIMUR	17138	6824	13057	251,14	191,34
KOTA PARIAMAN	87517	35137	67332	249,07	191,63

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel 3.9. diketahui **Angka Perkawinan Kasar** Kota Pariaman tahun 2016 sebesar 249,07. Artinya, di Kota Pariaman pada tahun 2016 dari 1.000 penduduk terdapat 249 penduduk berstatus kawin atau terjadi peristiwa perkawinan sebanyak 249 kali. Angka Perkawinan Umum (AKU) Kota Pariaman sebesar 191,63. Artinya dari 1.000 penduduk Kota Pariaman yang berusia 15 tahun keatas terdapat 192 penduduk berstatus kawin atau terjadi 192 peristiwa perkawinan.

Tabel 3.10 Angka Perkawinan Spesifik Penduduk Kota Pariaman Tahun 2016

STRUKTUR UMUR	BELUM KAWIN			KAWIN			JUMLAH		ANGKA PERKAWINAN SPESIFIK	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
<15	11.270	10.115	21.385				11.270	10.115	0,00	0,00
15-19	4.561	4.198	8.759	1	5	6	4.562	4.203	0,02	0,12
20-24	4.553	4.029	8.582	44	225	269	4.597	4.254	0,97	5,58
25-29	3.179	1.948	5.127	542	1.387	1.929	3.721	3.335	17,05	71,20
30-34	1.830	549	2.379	1.897	2.782	4.679	3.727	3.331	103,66	506,74
35-39	748	142	890	2.434	2.703	5.137	3.182	2.845	325,40	1.903,52
40-44	309	64	373	2.462	2.600	5.062	2.771	2.664	796,76	4.062,50
45-49	141	46	187	2.340	2.354	4.694	2.481	2.400	1.659,57	5.117,39
50-54	59	34	93	2.166	1.977	4.143	2.225	2.011	3.671,19	5.814,71
55-59	37	17	54	1.833	1.659	3.492	1.870	1.676	4.954,05	9.758,82
60-64	21	11	32	1.336	1.104	2.440	1.357	1.115	6.361,90	10.036,36
65-69	10	8	18	842	597	1.439	852	605	8.420,00	7.462,50
70-75	5	7	12	532	318	850	537	325	10.640,00	4.542,86
>75	6	18	24	674	323	997	680	341	11.233,33	1.794,44
KOTA PARIAMAN	26.729	21.186	47.915	17.103	18.034	35.137	43.832	39.220	63,99	85,12

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Angka Perkawinan Spesifik (Angka Perkawinan Menurut Umur dan Jenis Kelamin) menginformasikan perbandingan perkawinan antar kelompok umur dan antar jenis kelamin. Dari tabel 3.10. diketahui Angka Perkawinan Spesifik tahun 2016, untuk laki-laki usia 15-19 di kota Pariaman sebesar 0,02 persen. Artinya dari 1.000 penduduk laki-laki berusia 15-19 tahun hanya 1 orang yang berstatus kawin. Pada kelompok perempuan usia 15-19 tahun Angka Perkawinan Spesifiknya sebesar 0,12 persen. Artinya dari 1.000 penduduk perempuan berusia 15-19 tahun di Kota Pariaman terdapat 5-6 orang berstatus kawin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cepat menikah dibandingkan laki-laki.

Data ini berimplikasi kebijakan pemerintah Kota Pariaman masih perlu meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah bagi anak perempuan, sehingga tidak cepat memasuki usia pernikahan dini. Selain itu, sosialisasi budaya kesetaraan dan keadilan gender di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan

supaya perempuan juga punya kemauan dan mendapat kesempatan setara dengan anak laki-laki untuk mengembangkan potensinya sebagai sumber daya pembangunan. Berikut dipaparkan data Angka Perceraian Penduduk Kota Pariaman.

Tabel 3. 11. Angka Perceraian Penduduk di Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK			ANGKA PERCERAIAN UMUM	ANGKA PERCERAIAN KASAR
	STATUS CERAI HIDUP	UMUR >= 15	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN		
PARIAMAN TENGAH	407	23383	30315	1,74	1,34
PARIAMAN UTARA	322	16726	21670	1,93	1,49
PARIAMAN SELATAN	294	14166	18394	2,08	1,60
PARIAMAN TIMUR	224	13057	17138	1,72	1,31
KOTA PARIAMAN	1247	67332	87517	1,85	1,42

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Merujuk Tabel 3.11, **Angka Perceraian Kasar** memberikan gambaran sosiologis Kota Pariaman yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka Perceraian Kasar Kota Pariaman berada pada angka 1,42 persen. Artinya dari 1.000 penduduk terjadi peristiwa perceraian sebanyak 1-2 kali. Penyebab perceraian dapat dirujuk sebagai bagian urusan pemerintah bagian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan dinas sosial, karena perceraian menjadi salah satu fenomena masalah sosial.

Angka Perceraian Umum, menginformasikan status angka perceraian pada kelompok umur di atas 15 tahun. Angka Perceraian Umum Kota Pariaman menginformasikan dari 1.000 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terjadi perceraian sebanyak 1-2 kali atau dari 1.000 penduduk Kota Pariaman terdapat 1 dan 2 orang yang melakukan perceraian.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kecacatan

Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah bagi penyandang cacat. Selama ini perhatian pemerintah dianggap kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini. Berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Informasi jumlah penyandang cacat terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Tabel 3.12. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

KECAMATAN	JENIS KECACATAN						JUMLAH
	CACAT FISIK	CACAT NETRA/ BUTA	CACAT RUNGU /WICARA	CACAT MENTAL/ JIWA	CACAT FISIK DAN MENTAL	CACAT LAINNYA	
Pariaman Tengah	11	8	10	12	7	1	49
Pariaman Utara	18	4	8	11	10	1	52
Pariaman Selatan	9	9	2	11	4	6	41
Pariaman Timur	15	4	6	16	6	4	51
Kota Pariaman	53	25	26	50	27	12	193

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Pada Tabel. 3.12. terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang cacat di Kota Pariaman tidak terlalu besar yaitu 193 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kota Pariaman yaitu 88.717 jiwa. (0,22%), Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kota Pariaman untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas layanan umum lainnya. Dilihat dari jenis kecacatan, jumlah terbesar adalah penyandang mental/jiwa yaitu 50 orang, diikuti penyandang cacat fisik sebesar 53 orang, dan terkecil adalah penyandang cacat lainnya yaitu 12 orang.

Tabel 3.13. Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman, Tahun 2016

JENIS KECACATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
CACAT FISIK	34	19	53
CACAT NETRA/BUTA	11	14	25
CACAT RUNGU/WICARA	11	15	26
CACAT MENTAL/JIWA	31	19	50
CACAT FISIK DAN MENTAL	16	11	27
CACAT LAINNYA	6	6	12
Kota Pariaman	109	84	193

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, maka penyandang cacat terbesar adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jenis kecacatan adalah cacat mental dan Cacat Fisik yaitu 65 orang.

D. Profil Kependudukan dari Aspek Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.

1. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dan kepala keluarga dalam satu rumah tangga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan penduduk. Rata-rata jumlah anggota keluarga dalam satu keluarga terkait dengan tantangan beban ketergantungan keluarga. Diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga, akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Diasumsikan pula jika dalam satu rumah tangga terdiri dari lebih dari satu keluarga, menunjukkan kondisi kesejahteraan yang kurang ideal, karena terkait dengan kecukupan daya dukung dan daya tampung lingkungan rumah tangga.

Tabel 3.14. Jumlah Penduduk, Jumlah Keluarga, dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Kota Pariaman, Tahun 2016

KECAMATAN	Penduduk		Keluarga		Jumlah Rata-rata Anggota Keluarga
	n	%	n	%	
PARIAMAN TENGAH	30.699	34,60	7.531	34,51	4,08
PARIAMAN UTARA	21.958	24,75	5.272	24,16	4,17
PARIAMAN SELATAN	18.707	21,09	4.630	21,22	4,04
PARIAMAN TIMUR	17.353	19,56	4.390	20,12	3,95
KOTA PARIAMAN	88.717	100,00	21.823	100,00	4,07

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Pariaman sebanyak 4,07% per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kota Pariaman lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4-5 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 4-5 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kota Pariaman dan dapat digunakan pemerintah Kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 4-5 orang.

2. Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Untuk Kota Pariaman status hubungan dengan Kepala Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga Kota Pariaman Tahun 2016

Status Hubungan Dalam Keluarga	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan		N	%
	N	%	N	%		
Kepala Keluarga	17.476	39,08	4.347	9,88	21.823	24,60
Suami	2	0,00	0	0,00	2	0,00
Isteri	0	0,00	16.795	38,17	16.795	18,93
Anak	25.063	56,05	20.383	46,32	45.446	51,23
Menantu	29	0,06	8	0,02	37	0,04
Cucu	529	1,18	420	0,95	949	1,07
Orang Tua	42	0,09	329	0,75	371	0,42
Mertua	102	0,23	809	1,84	911	1,03
Famili Lain	1.421	3,18	887	2,02	2.308	2,60
Pembantu	0	0,00	3	0,01	3	0,00
Lainnya	50	0,11	22	0,05	72	0,08
Kota Pariaman	44.714	100,00	44.003	100,00	88.717	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Dari Tabel. 3.15. nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 17.476 kepala keluarga laki-laki (39,08 %) yang mempunyai isteri sebanyak 16.795 orang (38,17%), sedangkan dari 4.347 kepala keluarga perempuan (9,88%) hanya 2 orang yang memiliki suami.

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut, diantaranya adalah kepala keluarga mempunyai status perkawinan belum kawin. Ada pula kemungkinan bahwa suami tidak berada di satu tempat tinggal dengan istri. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 5,24 persen. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kota Pariaman jumlahnya tidak besar. Namun demikian, perlu diperhatikan adalah keluarga luas yang dikepalai oleh perempuan, jumlahnya lebih besar dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki.

3. Karakteristik Kepala Keluarga

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 3.16. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman, Tahun 2016

KECAMATAN	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan		N	%
	n	%	n	%		
PARIAMAN TENGAH	6242	82,88	1289	17,12	7531	34,51
PARIAMAN UTARA	4197	79,61	1075	20,39	5272	24,16
PARIAMAN SELATAN	3573	77,17	1057	22,83	4630	21,22
PARIAMAN TIMUR	3464	78,91	926	21,09	4390	20,12
Kota Pariaman	17.476	80,08	4.347	19,92	21.823	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Keberadaan kepala keluarga perempuan (kelompok PEKA/Perempuan Kepala Keluarga) ada 19,92 persen. Kelompok ini perlu perhatian khusus terkait program-program bantuan sosial, karena Perempuan Kepala Keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam hal akses kebijakan sosial pemerintah. Kepala keluarga perempuan tertinggi berada di kecamatan Pariaman Selatan (22,83%). Keberadaan kepala keluarga perempuan ini mengindikasikan terjadinya cerai hidup atau cerai mati, serta kemandirian wanita untuk tidak berkeluarga. Berikut ini Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga menurut status kawin dan jenis kelamin.

Tabel 3.17. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga menurut Status Kawin dan Jenis Kelamin Kota Pariaman Tahun 2016

Status Perkawinan	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan		N	%
	n	%	N	%		
Belum Kawin	231	1,32	125	2,88	356	1,63
Kawin	16714	95,64	785	18,06	17499	80,19
Cerai Hidup	179	1,02	682	15,69	861	3,95
Cerai Mati	352	2,01	2755	63,38	3107	14,24
KOTA PARIAMAN	17.476	100,00	4.347	100,00	21.823	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepala keluarga yang sudah berstatus kawin mempunyai persentase yang paling tinggi yaitu sebanyak 80,19% atau 17.499 jiwa. Sebesar 16714 jiwa (95,64%) diantaranya adalah kepala keluarga laki-laki dan 785 jiwa (18,06%) adalah kepala keluarga perempuan. Kemudian kepala keluarga yang berstatus cerai hidup sebanyak 861 jiwa (3,95%), dimana 179 jiwa (1,02%) adalah kepala keluarga laki-laki dan 682 jiwa (15,69%) adalah kepala keluarga perempuan. Pada status cerai mati, perbedaan persentase mencolok antara perempuan 2755 jiwa (63,38%) dan laki-laki 352 jiwa (2,01%). Berarti perempuan lebih tinggi daya tahan hidup mandiri sepeninggal suaminya.

Karakteristik kepala keluarga akan lebih menarik jika dikaitkan juga dengan kelompok umur.

Tabel 3.18. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Status Kawin, Kota Pariaman, Tahun 2016

	Status Kawin	Jumlah
--	--------------	--------

	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		N	%
	N	%	n	%	n	%	n	%		
15-19	3	0,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,01
20-24	57	16,01	49	0,28	1	0,12	0	0,00	107	0,49
25-29	66	18,54	547	3,13	15	1,74	7	0,23	635	2,91
30-34	73	20,51	1.919	10,97	54	6,27	20	0,64	2.066	9,47
35-39	37	10,39	2.449	14,00	80	9,29	46	1,48	2.612	11,97
40-44	34	9,55	2.511	14,35	88	10,22	102	3,28	2.735	12,53
45-49	27	7,58	2.376	13,58	135	15,68	167	5,37	2.705	12,40
50-54	15	4,21	2.222	12,70	135	15,68	298	9,59	2.670	12,23
55-59	12	3,37	1.899	10,85	130	15,10	398	12,81	2.439	11,18
60-64	14	3,93	1.396	7,98	117	13,59	533	17,15	2.060	9,44
65-69	7	1,97	891	5,09	52	6,04	478	15,38	1.428	6,54
70-75	5	1,40	552	3,15	28	3,25	407	13,10	992	4,55
>75	6	1,69	688	3,93	26	3,02	651	20,95	1.371	6,28
Kota Pariaman	356	100,0	17.499	100,0	861	100,0	3.107	100,0	21.823	100,0

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dari Tabel 3.18 terlihat bahwa mayoritas keluarga di Kota Pariaman dikepalai oleh kepala keluarga yang berumur antara 30-59 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kota Pariaman merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif.

Proporsi tertinggi kepala keluarga berstatus kawin berada pada kelompok umur 30-59 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kota Pariaman berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana. Sedangkan kepala keluarga yang berstatus belum kawin terbesar juga berada pada kelompok umur 20-39 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 45-59 tahun. Serta kepala keluarga berstatus cerai mati berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas.

Tabel 3.19. Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kota Pariaman, Tahun 2016.

Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan			
	n	%	N	%	N	%
15-19	1	0,01	2	0,05	3	0,01
20-24	69	0,39	38	0,87	107	0,49
25-29	553	3,16	82	1,89	635	2,91
30-34	1891	10,82	175	4,03	2066	9,47
35-39	2420	13,85	192	4,42	2612	11,97
40-44	2487	14,23	248	5,71	2735	12,53
45-49	2358	13,49	347	7,98	2705	12,40
50-54	2206	12,62	464	10,67	2670	12,23
55-59	1881	10,76	558	12,84	2439	11,18
60-64	1422	8,14	638	14,68	2060	9,44
65-69	887	5,08	541	12,45	1428	6,54
70-75	575	3,29	417	9,59	992	4,55
>75	726	4,15	645	14,84	1371	6,28
Kota Pariaman	17.476	100,00	4.347	100,00	21.823	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Secara umum Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun, sebanyak 2735 jiwa (12,53%). Proporsi Kepala Keluarga laki-laki tertinggi berada di kelompok umur 40-44 tahun, sebanyak 2.487 jiwa (14,23%). Proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 60-64 tahun, sebesar 638 jiwa (14,68%). Keberadaan 6,28persen Kepala Keluarga berumur 75 tahun ke atas mengindikasikan umur harapan hidup penduduk di Kota Pariaman tinggi.

Tabel 3.20. Distribusi Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Kota Pariaman Tahun 2016.

Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan			
	n	%	n	%	N	%
Tidak/Belum Sekolah	113	0,65	127	2,92	240	1,10
Belum Tamat SD/Sederajat	528	3,02	448	10,31	976	4,47
Tamat SD/Sederajat	3.538	20,24	1.639	37,70	5.177	23,72
SLTP/Sederajat	3.395	19,43	732	16,84	4.127	18,91
SLTA/Sederajat	7.187	41,12	1.005	23,12	8.192	37,54
Diploma I/II	169	0,97	80	1,84	249	1,14
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	500	2,86	84	1,93	584	2,68
Diploma IV/Strata I	1.865	10,67	225	5,18	2.090	9,58
Strata II	176	1,01	7	0,16	183	0,84
Strata III	5	0,03	0	0,00	5	0,02
Kabupaten Tanah Datar	17.476	100,00	4.347	100,00	21.823	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dari Tabel. 3.20 di atas, terlihat bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 37,54 persen, disusul dengan Tamat SD/Sederajat yang angkanya cukup tinggi sebesar 23,72 persen, dan SLTP/Sederajat sebesar 18,91 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D1/D2/D3 hanya sebesar 3,82 persen dan S1/S2/S3 sebesar 10,44 persen, dan masih adanya kepala keluarga yang tidak sekolah dan belum tamat SD persentasenya mencapai 5,57 persen. Gambaran di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga masih berpendidikan SD ke bawah. Hal ini sesuai dengan kondisi pendidikan secara nasional, yang harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah Kota Pariaman. Proses globalisasi yang sebentar lagi berlangsung, bonus demografi yang juga akan berlangsung, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kota Pariaman agar mempunyai daya saing global, sehingga dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan segera berlangsung. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi

anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Berikut ini Jumlah Kepala Keluarga menurut jenis pekerjaan dan jenis kelamin.

Tabel 3.21. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman, Tahun 2016

PEKERJAAN	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan			
	n	%	n	%	n	%
Belum/Tidak Bekerja	206	1,18	140	3,22	346	1,59
Mengurus Rumah Tangga	1	0,01	3.223	74,14	3.224	14,77
Pelajar/Mahasiswa	56	0,32	46	1,06	102	0,47
Pensiunan	439	2,51	117	2,69	556	2,55
Pegawai Negeri Sipil/PNS	1.705	9,76	206	4,74	1.911	8,76
Tentara Nasional Indonesia/TNI	81	0,46	0	0,00	81	0,37
Kepolisian RI/POLRI	223	1,28	0	0,00	223	1,02
Perdagangan	370	2,12	43	0,99	413	1,89
Petani/Pekebun	1.300	7,44	40	0,92	1.340	6,14
Peternak	27	0,15	0	0,00	27	0,12
Nelayan/Perikanan	625	3,58	0	0,00	625	2,86
Industri	14	0,08	2	0,05	16	0,07
Konstruksi	15	0,09	0	0,00	15	0,07
Transportasi	83	0,47	0	0,00	83	0,38
Karyawan Swasta	624	3,57	26	0,60	650	2,98
Karyawan BUMN	93	0,53	1	0,02	94	0,43
Karyawan BUMD	26	0,15	0	0,00	26	0,12
Karyawan Honorer	229	1,31	27	0,62	256	1,17
Buruh Harian Lepas	1.099	6,29	27	0,62	1.126	5,16
Buruh Tani/Perkebunan	358	2,05	14	0,32	372	1,70
Buruh Nelayan/Perikanan	123	0,70	0	0,00	123	0,56
Buruh Peternakan	6	0,03	1	0,02	7	0,03
Pembantu Rumah Tangga	0	0,00	7	0,16	7	0,03
Tukang Cukur	14	0,08	0	0,00	14	0,06
Tukang Listrik	7	0,04	0	0,00	7	0,03
Tukang Batu	114	0,65	1	0,02	115	0,53
Tukang Kayu	83	0,47	0	0,00	83	0,38
Tukang Sol Sepatu	9	0,05	0	0,00	9	0,04

Tukang Las/Pandai Besi	23	0,13	0	0,00	23	0,11
Tukang Jahit	156	0,89	38	0,87	194	0,89
Penata Rias	1	0,01	0	0,00	1	0,00
Penata Busana	1	0,01	0	0,00	1	0,00
Penata Rambut	1	0,01	1	0,02	2	0,01
Mekanik	77	0,44	0	0,00	77	0,35
Seniman	9	0,05	0	0,00	9	0,04
Tabib	0	0,00	1	0,02	1	0,00
Imam Masjid	10	0,06	0	0,00	10	0,05
Wartawan	7	0,04	0	0,00	7	0,03
Ustadz/Mubaligh	27	0,15	0	0,00	27	0,12
Juru Masak	0	0,00	2	0,05	2	0,01
Anggota DPRD Prov	1	0,01	0	0,00	1	0,00
Anggota DPRD Kab/Kota	12	0,07	0	0,00	12	0,05
Dosen	19	0,11	2	0,05	21	0,10
Guru	110	0,63	55	1,27	165	0,76
Pilot	7	0,04	0	0,00	7	0,03
Pengacara	4	0,02	0	0,00	4	0,02
Notaris	7	0,04	0	0,00	7	0,03
Dokter	11	0,06	0	0,00	11	0,05
Bidan	0	0,00	3	0,07	3	0,01
Perawat	3	0,02	3	0,07	6	0,03
Penyiar Radio	1	0,01	0	0,00	1	0,00
Pelaut	27	0,15	0	0,00	27	0,12
Peneliti	3	0,02	0	0,00	3	0,01
Sopir	319	1,83	0	0,00	319	1,46
Pialang	2	0,01	0	0,00	2	0,01
Pedagang	437	2,50	63	1,45	500	2,29
Perangkat Desa	20	0,11	7	0,16	27	0,12
Kepala Desa	25	0,14	0	0,00	25	0,11
Wiraswasta	8.222	47,05	251	5,77	8.473	38,83
Lainnya	4	0,02	0	0,00	4	0,02
KOTA PARIAMAN	17.476	100,00	4.347	100,00	21.823	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Untuk itu pemerintah Kota Pariaman perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi

mereka kecil. Kepala keluarga yang tidak bekerja, dapat disebabkan karena sudah memasuki usia pensiun atau memang tidak mampu masuk ke pasar kerja. Untuk mereka ini perlu diberikan intervensi untuk membantu meningkatkan status kesejahteraan mereka, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja memiliki status ekonomi yang rendah. Karena bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan diduga mereka tidak mempunyai penghasilan, sehingga pemerintah Kota Pariaman perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Selanjutnya Tabel 3.22 menunjukkan jenis pekerjaan yang banyak digeluti oleh kepala keluarga untuk menunjang perekonomian keluarga.

Tabel 3.22. Distribusi Kepala Keluarga menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman , Tahun 2016

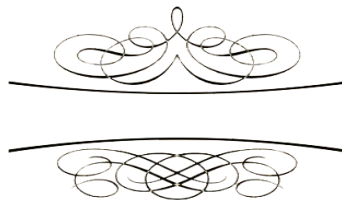
PEKERJAAN	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-Laki		Perempuan			
	n	%	n	%	n	%
Pegawai Negeri Sipil/PNS	1.705	10,16	206	25,09	1.911	10,86
Tentara Nasional Indonesia/TNI	81	0,48	0	0,00	81	0,46
Kepolisian RI/POLRI	223	1,33	0	0,00	223	1,27
Perdagangan	370	2,21	43	5,24	413	2,35
Petani/Pekebun	1.300	7,75	40	4,87	1.340	7,62
Peternak	27	0,16	0	0,00	27	0,15
Nelayan/Perikanan	625	3,73	0	0,00	625	3,55
Industri	14	0,08	2	0,24	16	0,09
Konstruksi	15	0,09	0	0,00	15	0,09
Transportasi	83	0,49	0	0,00	83	0,47
Karyawan Swasta	624	3,72	26	3,17	650	3,69
Karyawan BUMN	93	0,55	1	0,12	94	0,53
Karyawan BUMD	26	0,16	0	0,00	26	0,15
Karyawan Honorer	229	1,37	27	3,29	256	1,45
Buruh Harian Lepas	1.099	6,55	27	3,29	1.126	6,40
Buruh Tani/Perkebunan	358	2,13	14	1,71	372	2,11
Buruh Nelayan/Perikanan	123	0,73	0	0,00	123	0,70
Buruh Peternakan	6	0,04	1	0,12	7	0,04

Pembantu Rumah Tangga	0	0,00	7	0,85	7	0,04
Tukang Cukur	14	0,08	0	0,00	14	0,08
Tukang Listrik	7	0,04	0	0,00	7	0,04
Tukang Batu	114	0,68	1	0,12	115	0,65
Tukang Kayu	83	0,49	0	0,00	83	0,47
Tukang Sol Sepatu	9	0,05	0	0,00	9	0,05
Tukang Las/Pandai Besi	23	0,14	0	0,00	23	0,13
Tukang Jahit	156	0,93	38	4,63	194	1,10
Penata Rias	1	0,01	0	0,00	1	0,01
Penata Busana	1	0,01	0	0,00	1	0,01
Penata Rambut	1	0,01	1	0,12	2	0,01
Mekanik	77	0,46	0	0,00	77	0,44
Seniman	9	0,05	0	0,00	9	0,05
Tabib	0	0,00	1	0,12	1	0,01
Imam Masjid	10	0,06	0	0,00	10	0,06
Wartawan	7	0,04	0	0,00	7	0,04
Ustadz/Mubaligh	27	0,16	0	0,00	27	0,15
Juru Masak	0	0,00	2	0,24	2	0,01
Anggota DPRD Prov	1	0,01	0	0,00	1	0,01
Anggota DPRD Kab/Kota	12	0,07	0	0,00	12	0,07
Dosen	19	0,11	2	0,24	21	0,12
Guru	110	0,66	55	6,70	165	0,94
Pilot	7	0,04	0	0,00	7	0,04
Pengacara	4	0,02	0	0,00	4	0,02
Notaris	7	0,04	0	0,00	7	0,04
Dokter	11	0,07	0	0,00	11	0,06
Bidan	0	0,00	3	0,37	3	0,02
Perawat	3	0,02	3	0,37	6	0,03
Penyiar Radio	1	0,01	0	0,00	1	0,01
Pelaut	27	0,16	0	0,00	27	0,15
Peneliti	3	0,02	0	0,00	3	0,02
Sopir	319	1,90	0	0,00	319	1,81
Pialang	2	0,01	0	0,00	2	0,01
Pedagang	437	2,61	63	7,67	500	2,84
Perangkat Desa	20	0,12	7	0,85	27	0,15
Kepala Desa	25	0,15	0	0,00	25	0,14
Wiraswasta	8.222	49,02	251	30,57	8.473	48,16

Lainnya	4	0,02	0	0,00	4	0,02
KOTA PARIAMAN	16.774	100,00	821	100,00	17.595	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dilihat dari kegiatan ekonomi, 80,62 persen kepala keluarga di Kota Pariaman adalah bekerja dengan jenis pekerjaan terbesar adalah sebagai wiraswasta yaitu 48,16 persen, diikuti oleh pegawai negeri sipil yaitu 10,86 persen, Petani/perkebunan yaitu 7,62 persen, Buruh Harian Lepas 6,40 persen, Karyawan Swasta 3,69 persen Nelayan/Perikanan yaitu sebesar 3,55 persen, dan pedagang yaitu 2,84 persen.



BAB IV KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Faktor yang Memengaruhi kualitas penduduk suatu daerah antara lain:

a. Tingkat pendidikan penduduk

Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, yang menjadi modal mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

b. Tingkat kesehatan penduduk

Kesehatan merupakan modal seseorang untuk memulai aktivitasnya. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatannya.

c. Tingkat kesejahteraan penduduk

Pencapaian kesejahteraan ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Bab ini membahas kualitas penduduk dengan indikator pentingnya meliputi aspek: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan mobilitas.

A. Indikator Kesehatan

Indikator kesehatan biasanya diukur dari kelahiran yang meliputi angka kelahiran, pemeriksaan ante dan post natal, pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, angka kesakitan dan kematian bayi serta kematian ibu. Berikut gambaran penduduk berdasarkan kualitas penduduk Kota Pariaman.

1. Kelahiran (Fertilitas)

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator-indikator kelahiran ini sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

a) Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

Tabel 4.1. Rasio Anak dan Perempuan, Kota Pariaman Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK USIA 0-4 TAHUN	JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN USIA 15-49 TAHUN	RASIO ANAK DAN PEREMPUAN (CHILD WOMEN RATIO-CWR)
PARIAMAN TENGAH	1930	8351	23,11
PARIAMAN UTARA	1357	5860	23,16
PARIAMAN SELATAN	1130	4965	22,76
PARIAMAN TIMUR	1110	4582	24,23
KOTA PARIAMAN	5.527	23.758	23,26

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Pada tahun 2016, besarnya rasio anak dan perempuan di Kota Pariaman sebesar 23,26 persen. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 22-23 balita. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup tinggi karena masih besarnya jumlah anak balita. CWR tertinggi di Kecamatan Pariaman Timur sebesar 24,23, Sedangkan CWR terendah di Kecamatan Pariaman Selatan yaitu sebesar 22,76 persen.

b) Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)

Angka Kelahiran Kasar (CBR) adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu dikali 1000.

Tabel 4.2 dibawah ini menunjukkan Angka Kelahiran Kasar Kota Pariaman sebesar 18,42 persen, artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun 2016 terjadi 18-19 kelahiran hidup.

Tabel 4.2. Angka Kelahiran Kasar (CBR) Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN 2016	JUMLAH KELAHIRAN			ANGKA KELAHIRAN KASAR (CBR)
		LK	PR	L+P	
PARIAMAN TENGAH	30662	314	279	593	19,34
PARIAMAN UTARA	21945	212	189	401	18,27
PARIAMAN SELATAN	18686	189	144	333	17,82
PARIAMAN TIMUR	17338	164	142	306	17,65
KOTA PARIAMAN	88.631	879	754	1.633	18,42

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016

2. Kematian (Mortalitas)

Tingkat kesehatan umumnya dilihat dari besar kecilnya angka kematian, karena kematian erat kaitannya dengan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan membawa implikasi kebijakan peningkatan cakupan sarana dan pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, pencegahan dan penanganan penyakit menular, serta pemahaman dan kesadaran perilaku sehat masyarakat. Indikator kematian yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas hidup/kesehatan di suatu daerah adalah:

a) Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate/IMR/AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah satu tahun pada 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu *endogen* dan *eksogen*.

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu tahun sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 4.3. Angka Kematian Bayi (IMR/AKB) Menurut Kecamatan, Kota Pariaman , Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP			JUMLAH KEMATIAN BAYI			ANGKA KEMATIAN BAYI (IMR/AKB)
	L	P	L+P	L	P	L+P	
PARIAMAN TENGAH	314	279	593	9	3	12	20,24
PARIAMAN UTARA	212	189	401	3	2	5	12,47
PARIAMAN SELATAN	189	144	333	1	1	2	6,01
PARIAMAN TIMUR	164	142	306	4	2	6	19,61
KOTA PARIAMAN	879	754	1.633	17	8	25	15,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016

Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari 1.000 kelahiran hidup di Kota Pariaman terjadi kematian bayi sebanyak 6-7 bayi. Kematian bayi.

b) Angka Kematian Neonatal (Kematian Bayi Baru Lahir/NNDR)

Kematian neonatal atau kematian endogen adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kematian neonatal atau kematian bayi endogen pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir atau selama kehamilan.

Angka Kematian neonatal atau kematian endogen Kota Pariaman terlihat pada tabel dibawah ini yaitu 12-13 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.4. Angka Kematian Neonatal (NNDR) Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

NAMA KECAMATAN			
----------------	--	--	--

	L	P	L+P	L	P	L+P	
PARIAMAN TENGAH	314	279	593	8	2	10	16,86
PARIAMAN UTARA	212	189	401	2	1	3	7,48
PARIAMAN SELATAN	189	144	333	1	1	2	6,01
PARIAMAN TIMUR	164	142	306	4	2	6	19,61
KOTA PARIAMAN	879	754	1.633	15	6	21	12,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016.

c) Angka Kematian Post Neo-Natal (Angka Kematian Lepas Baru Lahir/PNNDR)

Kematian Post Neo-Natal (*Post Neo-Natal Death Rate*) adalah kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Angka Kematian Post Neonatal Kota Pariaman Tahun 2016 adalah sebesar 2,45, artinya kematian bayi setelah lepas baru lahir adalah antara 2-3 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup seperti terlihat pada tabel 5.5 dibawah ini.

Tabel 4.5. Angka Kematian Post Neonatal (PNNDR) Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP			KEMATIAN POST NEONATAL			AK POST NEONATAL
	L	P	L+P	L	P	L+P	
PARIAMAN TENGAH	314	279	593	1	1	2	3,37
PARIAMAN UTARA	212	189	401	1	1	2	4,99
PARIAMAN SELATAN	189	144	333	-	-	-	0,00
PARIAMAN TIMUR	164	142	306	-	-	-	0,00
KOTA PARIAMAN	879	754	1.633	2	2	4	2,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016.

d) Angka Kematian Anak

Kematian anak adalah kematian yang terjadi pada anak usia 12-59 bulan. Angka Kematian Anak selama Tahun 2016 adalah sebesar 6,12 persen, artinya kematian bayi setelah lepas baru lahir adalah antara 6 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup seperti terlihat pada tabel 4.6 dibawah ini

Tabel 4.6. Angka Kematian Anak Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP			KEMATIAN ANAK			ANGKA KEMATIAN ANAK
	L	P	L+P	L	P	L+P	
PARIAMAN TENGAH	314	279	593	4	2	6	10,12
PARIAMAN UTARA	212	189	401	1	-	1	2,49
PARIAMAN SELATAN	189	144	333	2	1	3	9,01
PARIAMAN TIMUR	164	142	306	-	-	-	0,00
KOTA PARIAMAN	879	754	1.633	7	3	10	6,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016.

e) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini adalah sebesar 21,43 persen, artinya dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 21-22 balita yang meninggal.

Tabel 4.7. Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP			KEMATIAN BALITA			ANGKA KEMATIAN ANAK
	L	P	L+P	L	P	L+P	
PARIAMAN TENGAH	314	279	593	13	5	18	30,35
PARIAMAN UTARA	212	189	401	4	2	6	14,96
PARIAMAN SELATAN	189	144	333	3	2	5	15,02
PARIAMAN TIMUR	164	142	306	4	2	6	19,61
KOTA PARIAMAN	879	754	1.633	24	11	35	21,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016.

f) Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate/AKI)

Dari tabel 4.8 diperoleh hasil yang sangat memuaskan bagi kesehatan ibu hamil, bersalin dan menyusui. Hal ini sangat membanggakan mengingat bahwa pada tahun sebelumnya terdapat kematian ibu sebanyak 5 orang.

Tabel 4.8. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2015

NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP			JUMLAH KEMATIAN IBU	ANGKA KEMATIAN IBU
	L	P	L+P		
PARIAMAN TENGAH	314	279	593	-	0,00
PARIAMAN UTARA	212	189	401	-	0,00
PARIAMAN SELATAN	189	144	333	-	0,00
PARIAMAN TIMUR	164	142	306	-	0,00
KOTA PARIAMAN	879	754	1.633	-	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016.

B. Indikator Pendidikan

Dalam kaitannya dengan fertilitas dan mortalitas, tingkat pendidikan mempunyai hubungan negatif, dalam arti orang yang berpendidikan tinggi cenderung mempunyai anak sedikit dan pendidikan yang tinggi juga akan cenderung menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu.

Profil penduduk Kota Pariaman dari aspek pendidikan akan dilihat dari angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni; angka penduduk putus sekolah APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sebagai contoh: APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan sesuai dibagi dengan jumlah penduduk berusia seharusnya pada jenjang tersebut. Misalnya: Angka partisipasi murni adalah perbandingan

penduduk usia antara 7 hingga 12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 12 tahun.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Pariaman pada tahun 2016 untuk setiap jenjang pendidikan tertentu di atas 100 persen, dimana pada jenjang pendidikan SD, APK nya 115,89 persen, artinya lebih banyak jumlah anak yang bersekolah SD dibandingkan jumlah penduduk Usia SD. Ini terjadi karena banyak anak sekolah SD yang berusia dibawah 7 tahun sehingga jumlah murid SD yang sedang sekolah lebih banyak jumlahnya dari jumlah penduduk usia SD.

Hal yang sama juga terlihat pada APK SLTA, yaitu 175,30 persen dimana penambahannya sangat signifikan. Ini disebabkan karena banyaknya Penduduk di luar Kota Pariaman yang sekolah di Kota Pariaman serta cepatnya anak masuk sekolah di Kota Pariaman.

Namun demikian, di tingkat SLTP, APK nya turun yaitu hanya 139,43 persen. Ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya anak putus sekolah, melanjutkan sekolah ke Kabupaten/Kota lain dan lain sebagainya.

Tabel 4.9. Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan, Kota Pariaman, Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Murid Sedang Sekolah	APK
SD	9.396	10.889	115,89
SLTP	5.060	7.055	139,43
SLTA	5.279	9.254	175,30

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pariaman Tahun 2016.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Jika dilihat dari tabel 4.10, Angka Partisipasi Murni Kota Pariaman dapat disimpulkan bahwa SEMUA jenjang pendidikan APM nya di bawah 100 persen. Berdasarkan data Dinas Dipora Kota Pariaman, pada umumnya tingginya Angka Partisipasi Murni (APM) dipengaruhi banyaknya murid atau siswa yang sekolah kurang atau melebihi batas usia sekolah.

Tabel 4.10. Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan, Kota Pariaman Tahun 2016

Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Murid Sedang Sekolah menurut Usia Sekolah	APM
SD	9.396	9.276	98,72
SLTP	5.060	3.870	76,48
SLTA	5.279	4.707	89,16

Sumber : Dinas Dikpora Kota Pariaman, Tahun 2016

3. Angka Putus Sekolah (APS)

Menurut Dinas Dikpora Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2016/2017, jumlah Angka Putus Sekolah di Kota Pariaman adalah sebanyak 15 orang atau 0,08 persen dari jumlah siswa yang terdaftar pada Dinas Dikpora Kota Pariaman Tahun Pelajaran 2016/2017.

Tabel 4.11. Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan, Kota Pariaman, Tahun 2016

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH MURID PUTUS SEKOLAH	% ANGKA PUTUS SEKOLAH
SD	9.396	7	0,07
SLTP	5.060	5	0,10
SLTA	5.279	3	0,06
JUMLAH	19.735	15	0,08

Sumber : Dinas Dikpora Kota Pariaman, Tahun 2016

C. Indikator Ekonomi

Bagian ekonomi akan membahas tentang proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja, angka partisipasi angkatan kerja, jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk usia 15-64 tahun yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Indikator ini berguna bagi pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia kerja potensial.

1. Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Bekerja dan Menganggur/Pencari Kerja)

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas (Tenaga Kerja/ *manpower*) dan tidak termasuk di dalamnya penduduk yang sedang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Angkatan Kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (*employed*) dan mencari pekerjaan/menganggur (*unemployed*).

a) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia kerja Kota Pariaman adalah sebesar 61.209 dengan persentase sebesar 68,99 dari jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 2016 sebagaimana terlihat pada tabel 4.12 dibawah ini. Jumlah penduduk usia kerja terbesar ada di Kecamatan Pariaman Tengah yaitu sebesar 70,46 persen dan terkecil ada di Kecamatan Timur yaitu sebesar 67,43 persen.

Tabel 4.12. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	USIA KERJA	JUMLAH PENDUDUK	% JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA
PARIAMAN TENGAH	21631	30699	70,46
PARIAMAN UTARA	15166	21958	69,07
PARIAMAN SELATAN	12711	18707	67,95
PARIAMAN TIMUR	11701	17353	67,43
KOTA PARIAMAN	61.209	88.717	68,99

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

b) Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari kerja (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Kota Pariaman Tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG TIDAK BEKERJA	JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANKATAN KERJA	TENAGA KERJA	APAK
PARIAMAN TENGAH	1136	9478	10614	11017	21631	49,10
PARIAMAN UTARA	1339	5742	7081	8085	15166	46,70
PARIAMAN SELATAN	812	5197	6009	6702	12711	47,30
PARIAMAN TIMUR	626	5077	5703	5998	11701	48,70
KOTA PARIAMAN	3.913	25.494	29.407	31.802	61.209	48,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Pariaman adalah 48,00 persen. APAK tertinggi terdapat pada kecamatan Pariaman Tengah yaitu sebesar 49,10 persen. APAK terendah terlihat pada kecamatan Pariaman Utara dan Selatan 46,70persen.

Tabel 4.14. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Kota Pariaman, Tahun 2016

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK YANG TIDAK BEKERJA	JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANKATAN KERJA	TENAGA KERJA	APAK
15-19	985	23	1008	7757	8765	11,50
20-24	980	439	1419	7434	8853	16,00
25-29	1040	2481	3521	3561	7082	49,70
30-34	484	4527	5011	2148	7159	70,00
35-39	157	3998	4155	2047	6202	67,00
40-44	81	3491	3572	2123	5695	62,70
45-49	57	3211	3268	1986	5254	62,20
50-54	44	3063	3107	1661	4768	65,20
55-59	37	2568	2605	1568	4173	62,40
60-64	48	1693	1741	1517	3258	53,40
KOTA PARIAMAN	3.913	25.494	29.407	31.802	61.209	48,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dari Tabel 4.14 nampak bahwa jumlah angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 5.011 orang, diikuti kelompok umur 35-39 tahun sebesar 4.527 orang dan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 1008 orang.

Tabel 4.15. Distribusi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman Tahun 2016

TINGKAT PENDIDIKAN	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	332	1,07	342	1,13	674	1,10
Belum Tamat SD/Sederajat	3802	12,25	3393	11,25	7.195	11,75
Tamat SD/Sederajat	5651	18,21	5376	17,82	11.027	18,02
SLTP/Sederajat	6923	22,31	5970	19,79	12.893	21,06
SLTA/Sederajat	11290	36,38	10276	34,06	21.566	35,23
Diploma I/II	173	0,56	662	2,19	835	1,36
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	538	1,73	1124	3,73	1.662	2,72
Diploma IV/Srata I	2136	6,88	2900	9,61	5.036	8,23
Strata II	187	0,60	125	0,41	312	0,51
Strata III	5	0,02	4	0,01	9	0,01
Jumlah	31.037	100,00	30.172	100,00	61.209	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dari Tabel 4.15 nampak bahwa angkatan kerja Kota Pariaman menurut tingkat pendidikan formalnya cukup baik yaitu hampir separuh (35,23%) angkatan kerja di Kota Pariaman berpendidikan SLTA/ sederajat, kemudian 21,26 persen berpendidikan SLTP/ sederajat, 18,02 persen berpendidikan Tamat SD/ sederajat, dan 8,23 persen berpendidikan S1. Terbukanya kesempatan pendidikan, telah mendorong penduduk baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Berbagai fasilitas pendidikan dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi tersedia, dan dimanfaatkan oleh penduduk Kota Pariaman maupun kabupaten-kabupaten di sekitarnya termasuk mereka yang dari jauh.

Persentase angkatan kerja laki-laki yang menamatkan pendidikan Dasar dan menengah lebih tinggi dibandingkan perempuan. Akan tetapi untuk pendidikan yang lebih tinggi, persentase angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja laki-laki. Ini disebabkan sebagian besar penduduk laki-laki di Kota Pariaman setelah tamat SLTA pergi merantau ke daerah lain seperti ke Jakarta, Pekanbaru, Batam dan Kota Lainnya di Indonesia. Kondisi ini mirip dengan kondisi nasional, bahwa angkatan kerja terbanyak berpendidikan SLTA. Oleh sebab itu untuk menampung tenaga kerja SLTA ini, pemerintah memperbanyak pendidikan kejuruan, yang mempersiapkan lulusannya agar langsung terjun ke pasar kerja.

Tabel 4.16. Distribusi Angkatan Kerja yang Bekerja menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kota Pariaman Tahun 2016

JENIS PEKERJAAN	ANGKATAN KERJA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	N	%	n	%	n	%
Pegawai Negeri Sipil/PNS	1.761	8,30	2.294	36,00	4.055	14,70
Tentara Nasional Indonesia/TNI	94	0,40	0	0,00	94	0,30
Kepolisian RI/POLRI	245	1,20	7	0,10	252	0,90
Perdagangan	498	2,30	142	2,20	640	2,30
Petani/Pekebun	1.411	6,60	67	1,10	1.478	5,40
Peternak	31	0,10	2	0,00	33	0,10
Nelayan/Perikanan	765	3,60	2	0,00	767	2,80
Industri	15	0,10	12	0,20	27	0,10
Konstruksi	18	0,10	1	0,00	19	0,10
Transportasi	109	0,50	2	0,00	111	0,40
Karyawan Swasta	915	4,30	447	7,00	1.362	4,90
Karyawan BUMN	118	0,60	46	0,70	164	0,60
Karyawan BUMD	30	0,10	17	0,30	47	0,20
Karyawan Honorer	304	1,40	495	7,80	799	2,90
Buruh Harian Lepas	1.471	6,90	54	0,80	1.525	5,50
Buruh Tani/Perkebunan	380	1,80	33	0,50	413	1,50
Buruh Nelayan/Perikanan	147	0,70	1	0,00	148	0,50
Buruh Peternakan	7	0,00	1	0,00	8	0,00

Pembantu Rumah Tangga	0	0,00	13	0,20	13	0,00
Tukang Cukur	16	0,10	0	0,00	16	0,10
Tukang Listrik	10	0,00	0	0,00	10	0,00
Tukang Batu	133	0,60	1	0,00	134	0,50
Tukang Kayu	88	0,40	0	0,00	88	0,30
Tukang Sol Sepatu	14	0,10	0	0,00	14	0,10
Tukang Las/Pandai Besi	31	0,10	0	0,00	31	0,10
Tukang Jahit	191	0,90	176	2,80	367	1,30
Penata Rias	2	0,00	7	0,10	9	0,00
Penata Busana	1	0,00	0	0,00	1	0,00
Penata Rambut	3	0,00	4	0,10	7	0,00
Mekanik	104	0,50	1	0,00	105	0,40
Seniman	9	0,00	1	0,00	10	0,00
Tabib	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Paraji	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Imam Masjid	10	0,00	0	0,00	10	0,00
Wartawan	7	0,00	1	0,00	8	0,00
Ustadz/Mubaligh	27	0,10	0	0,00	27	0,10
Juru Masak	0	0,00	3	0,00	3	0,00
Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Anggota DPRD Prov	1	0,00	0	0,00	1	0,00
Anggota DPRD Kab/Kota	12	0,10	0	0,00	12	0,00
Dosen	21	0,10	34	0,50	55	0,20
Guru	122	0,60	503	7,90	625	2,30
Pengacara	9	0,00	1	0,00	10	0,00
Notaris	5	0,00	2	0,00	7	0,00
Arsitek	2	0,00	0	0,00	2	0,00
Akuntan	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Konsultan	9	0,00	3	0,00	12	0,00
Dokter	14	0,10	29	0,50	43	0,20
Bidan	0	0,00	106	1,70	106	0,40
Perawat	5	0,00	66	1,00	71	0,30
Apoteker	0	0,00	1	0,00	1	0,00
Penyiar Radio	1	0,00	3	0,00	4	0,00
Pelaut	35	0,20	0	0,00	35	0,10
Peneliti	3	0,00	0	0,00	3	0,00
Sopir	358	1,70	0	0,00	358	1,30

Pialang	2	0,00	0	0,00	2	0,00
Pedagang	583	2,70	221	3,50	804	2,90
Perangkat Desa	22	0,10	43	0,70	65	0,20
Kepala Desa	25	0,10	0	0,00	25	0,10
Wiraswasta	11.028	51,90	1.517	23,80	12.545	45,50
Lainnya	11	0,10	2	0,00	13	0,00
Kota Pariaman	21.233	100,00	6.365	100,00	27.598	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel. 4.16 menunjukkan penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 45,50 persen angkatan kerja Kota Pariaman mayoritas bekerja sebagai wiraswasta, 14,70 persen sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Petani/Pekebun sebesar 5,50 persen, 5,40 Persen sebagai buruh harian lepas dan 4,90 persen sebagai karyawan swasta. Sedangkan untuk Nelayan/perikanan hanya 2,80 persen saja mengingat Kota Pariaman terletak di pesisir Pantai seharusnya Pekerjaan Nelayan persentasenya lebih banyak, mungkin disebabkan dalam pengurusan Administrasi Kependudukan penduduk tersebut melaporkan pekerjaannya sebagai wiraswasta atau buruh harian lepas.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa sector pertanian banyak memberikan peluang kerja dan sektor informal (wiraswasta) merupakan pilihan utama bagi penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

2. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran)

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan mereka yang putus asa untuk memperoleh pekerjaan.

Tabel 4.17. Tingkat Pengangguran Menurut Kecamatan, Kota Pariaman Tahun 2016

NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK YANG TIDAK BEKERJA	JUMLAH PENDUDUK YANG BEKERJA	ANGKATAN KERJA	BUKAN ANKATAN KERJA	TENAGA KERJA	TINGKAT PENGANGGURAN
PARIAMAN TENGAH	1136	9478	10614	11017	21631	10,70
PARIAMAN UTARA	1339	5742	7081	8085	15166	18,91
PARIAMAN SELATAN	812	5197	6009	6702	12711	13,51
PARIAMAN TIMUR	626	5077	5703	5998	11701	10,98
KOTA PARIAMAN	3.913	25.494	29.407	31.802	61.209	13,31

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel. 4.17 menunjukkan angkatan kerja yang menganggur di Kota Pariaman adalah 13,31 persen. Dari tabel 4.17 tersebut terlihat bahwa pengangguran tertinggi berada di kecamatan Pariaman Utara yakni 18,91 persen, diikuti kecamatan Pariaman Selatan yakni 13,51 persen.

Tabel 4.18. Tingkat Pengangguran Menurut Kelompok Umur, Kota Pariaman, Tahun 2016

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	N	%	n	%	N	%
15-19	548	23,84	437	24,93	985	24,31
20-24	567	16,80	413	23,56	980	24,19
25-29	594	25,00	446	25,44	1.040	25,67
30-34	289	21,80	195	11,12	484	11,94
35-39	96	22,20	61	3,48	157	3,87
40-44	50	0,40	31	1,77	81	2,00
45-49	35	0,90	22	1,25	57	1,41
50-54	26	2,20	18	1,03	44	1,09
55-59	22	0,10	15	0,86	37	0,91
60-64	23	0,00	25	1,43	48	1,18
KOTA Pariaman	2.250	100,00	1.663	100,00	3.913	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 4.18 memperlihatkan angka pengangguran terendah berada pada kelompok umur 55-59 tahun yakni hanya 0,91 persen. Sedangkan angka

pengangguran tertinggi berada pada kelompok umur 20-24 tahun mencapai 25,67 persen, 15-19 tahun yakni 24,31 persen. Penduduk kelompok umur 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk di bangku pendidikan, belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pariaman untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan ketrampilan.

Angka pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik misalnya dengan memberikan bekal ketrampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja. Jika angka pengangguran ini tidak ditangani dengan baik dikhawatirkan akan mempunyai implikasi sosial yang luas disebabkan mereka tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, sebagai contoh kriminalitas. Indikator ini sangat penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Tabel 4.19. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan, Kota Pariaman, Tahun 2016

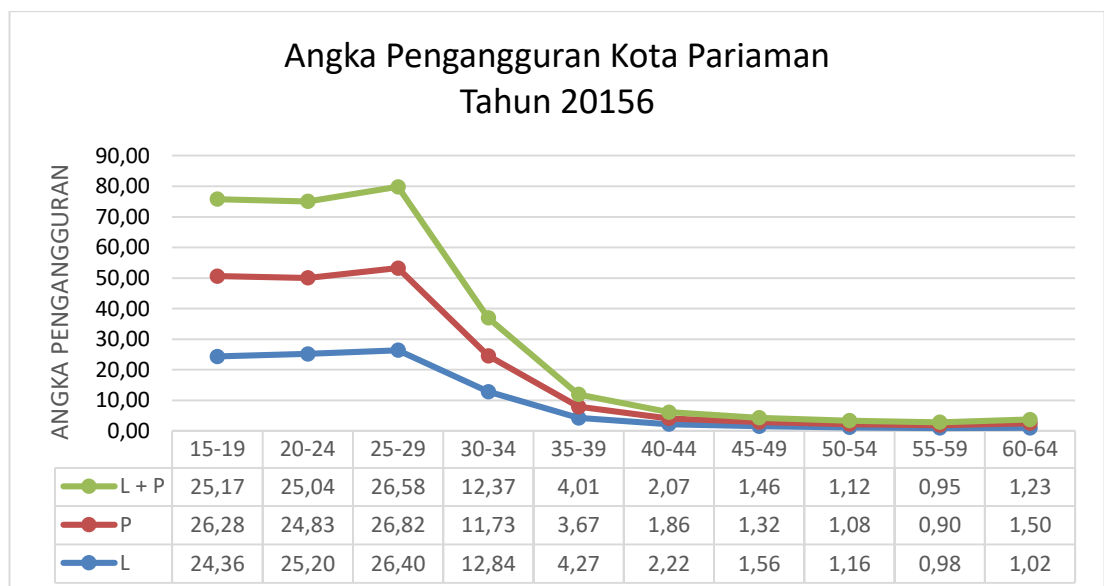
TINGKAT PENDIDIKAN	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	235	10,44	220	13,23	455	11,63
Belum Tamat SD/Sederajat	461	20,49	284	17,08	745	19,04
Tamat SD/Sederajat	379	16,84	210	12,63	589	15,05
SLTP/Sederajat	396	17,60	215	12,93	611	15,61
SLTA/Sederajat	687	30,53	565	33,97	1.252	32,00
Diploma I/II	3	0,13	14	0,84	17	0,43
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	18	0,80	43	2,59	61	1,56
Diploma IV/Srata I	71	3,16	111	6,67	182	4,65
Strata II	0	0,00	1	0,06	1	0,03
Jumlah	2.250	100,00	1.663	100,00	3.913	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Apabila pencari pekerjaan ini dikaitkan dengan pendidikan yang ditamatkan, maka dari tabel 4.19 terlihat bahwa lebih dari separuh angkatan kerja yang

mencari pekerjaan (62,66%) tamat pendidikan menengah yaitu 32,00 persen tamat SLTA/Sederajat dan 15,61 persen tamat SLTP/Sederajat, sedangkan yang tamat SD/ sederajat sebesar 15,05 persen. Lebih memprihatinkan adalah 11,63 persen yang mencari pekerjaan tidak berpendidikan dan 19,04 persen tidak tamat SD. Dengan kualitas pendidikan yang rendah tersebut, perlu adanya perhatian pemerintah berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dan perlunya memberikan keterampilan agar mereka mampu bersaing di pasar kerja.

Gambar 4.21



Grafik di atas menggambarkan angka pengangguran di Kota Pariaman. Dari gambar tersebut terlihat bahwa angka pengangguran meningkat pada usia 15-19 tahun dan memuncak pada usia 25-29 tahun namun kemudian semakin menurun pada usia 30-34 tahun jika dilihat dari kelompok umur. Pengangguran terbesar berada pada kelompok umur muda (25-29 tahun) yaitu mencapai 26,58 persen dan yang terendah pada kelompok umur 55-59 tahun yaitu 0,95 persen saja, kemudian meningkat kembali pada kelompok umur 60 tahun ke atas.

D. Indikator Sosial

Bagian ini menyajikan informasi kependudukan dilihat dari: jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, proporsi penduduk miskin penerima askeskin dan mobilitas penduduk.

1. Pekerja Anak (<15 tahun)

Salah satu bentuk hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi rentan menghasilkan pekerja anak. Dampak negatif apabila anak bekerja ditempat yang memiliki pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak baik fisik, mental, sosial dan intelektual. Latar belakang pendidikan yang rendah serta ketidakberdayaan pekerja anak sering menjadi penyebab terjerumusnya pekerja anak pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak. Berdasarkan Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman belum ada terdapat pekerja anak dibawah usia 15 tahun. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Kota Pariaman berjalan dengan baik.

2. Penduduk penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dilihat dari penduduk penerima JKN total sebanyak 62.230 jiwa, penduduk penerima jamkesmas sebesar 23.479 jiwa dan penduduk penerima Jamkesda sebanyak 9.054.

Tabel 5.20 Penduduk Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional

NO	NAMA KECAMATAN	PESERTA JKN			TOTAL PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
		PENDUDUK PENERIMA JAMKESMAS	PENDUDUK PENERIMA JAMKESDA	PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (Mandiri)	
1	Pariaman Tengah				
2	Pariaman Utara				
3	Pariaman Selatan				
4	Pariaman Timur				
	Kota Pariaman	23.479	9.054	29.697	62.230

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2016

3. Mobilitas Penduduk

Mobilitas (migrasi) penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 macam mobilitas penduduk, yaitu mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk permanen (migrasi). Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan yang bersifat tidak tetap/sementara. Sedangkan mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena di daerah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Tabel 4.21 Angka Migrasi Netto per Kecamatan Kota Pariaman tahun 2016

NO	KECAMATAN		JUMLAH MIGRASI			JUMLAH PENDUDUK TENGAH TAHUN	ANGKA MIGRASI NETTO
	KODE	KECAMATAN	MASUK	KELUAR	SELISIH		
1	13.77.01	Pariaman Tengah	347	1222	875	30662	28,54
2	13.77.02	Pariaman Utara	266	639	373	21945	17,00
3	13.77.03	Pariaman Selatan	311	469	158	18686	8,46
4	13.77.04	Pariaman Timur	216	444	228	17338	13,15
Kota Pariaman			1140	2774	1634	88.631	18,44

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 4.22 Angka Migrasi Bruto per Kecamatan Kota Pariaman tahun 2016

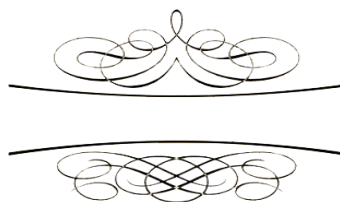
NO	KECAMATAN		MIGRASI MASUK		MIGRASI KELUAR		ANGKA MIGRASI BRUTO	
	KODE	KECAMATAN	N	%	N	%	N	%
1	13.77.01	Pariaman Tengah	347	30,44	1222	44,05	1569	40,09
2	13.77.02	Pariaman Utara	266	23,33	639	23,04	905	25,45
3	13.77.03	Pariaman Selatan	311	27,28	469	16,91	780	21,68
4	13.77.04	Pariaman Timur	216	18,95	444	16,01	660	24,25
		Kota Pariaman	1140	100,00	2774	100,00	3914	100,00

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel 4.22. tersebut terlihat bahwa banyaknya migrasi masuk dalam 1 tahun adalah 1140 jiwa. Migrasi masuk terbesar ke wilayah kecamatan Pariaman Tengah. Hal ini diduga karena Kecamatan Pariaman Tengah terletak di pusat kota.

Sedangkan migrasi keluar sebanyak 2774 jiwa. Penduduk pindah keluar terbesar dari kecamatan Pariaman Tengah juga. Diduga karena beberapa penduduk terdesak oleh pendatang, atau karena perkembangan fasilitas perdagangan dan industri daerah yang berbatasan, seperti Kota Padang yang hanya daya tempuhnya lebih kurang 1 (satu) jam saja, maka berpindah untuk pengembangan usaha dan penghidupan mereka, apalagi penduduk Kota Pariaman yang banyak merantau ke daerah lain seperti ke Kota Pekanbaru, Jakarta, Batam dan kota besar lainnya di Indonesia.

Angka Migrasi Netto (*nett-migration/Mn*) merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Angka migrasi netto penduduk Kota Pariaman tahun 2016 adalah migrasi netto negatif sebesar -18,44. Hal ini menunjukkan migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk, dimana setiap 1.000 penduduk Kota Pariaman terdapat 18-19 jiwa migran keluar.



KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan menjadi keniscayaan, sebagai bukti status legal seseorang untuk memperoleh berbagai pelayanan publik seperti perbankan, pertanahan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dokumen kependudukan merupakan kewajiban Negara untuk memberikan status legal bagi warganya, sekaligus sebagai sumber data kependudukan.

Pemberian dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk harus melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka. Implikasinya, kualitas pelayanan kependudukan dan kualitas validasi informasi menjadi hal kritis. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dipengaruhi banyak faktor, antara lain: kesadaran penduduk, kedekatan dan kemudahan akses ke tempat pelayanan, kualitas pelayanan serta kualitas informasi layanan kependudukan. Meskipun menganut stelsel aktif yang berarti warga menekankan pada keaktifan warga, namun peran pemerintah Kota Pariaman tetap melakukan upaya sosialisasi terus menerus secara luas guna mendorong pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Pariaman berguna untuk mengetahui jumlah keluarga dengan profil anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab administratif Kota Pariaman.

Tabel 5.1. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga, Kota Pariaman

Tahun 2016

KECAMATAN	n KELUARGA	N KELUARGA YANG MEMILIKI KK SIAK	N KELUARGA YANG TIDAK MEMILIKI KK SIAK	% KELUARGA YANG MEMILIKI KK SIAK
PARIAMAN TENGAH	7.828	7.468	360	95,40
PARIAMAN UTARA	5.474	5.077	397	92,75
PARIAMAN SELATAN	4.776	4.289	487	89,80
PARIAMAN TIMUR	4.510	4.276	234	94,81
KOTA PARIAMAN	22.588	21.110	1.478	93,46

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

B. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri dan pengakuan pemerintah. KTP ini wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah. KTP dipersyaratkan untuk beragam urusan penduduk yang berkaitan dengan legalitas, sebagai contoh mengurus perkawinan, urusan dengan Bank, mengurus jaminan sosial, dsb.

Tabel 5.2. Jumlah dan Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik . Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	N WAJIB KTP			N PENDUDUK YANG MEREKAM KTP-EL			N PENDUDUK YANG BELUM MEREKAM KTP-EL			% WAJIB KTP YANG MEREKAM KTP EL
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
PARIAMAN TENGAH	10781	10919	21700	10179	10519	20.698	602	400	1.002	95,38
PARIAMAN UTARA	7646	7809	15455	6928	7419	14.347	718	390	1.108	92,83
PARIAMAN SELATAN	6472	6626	13098	5935	6329	12.264	537	297	834	93,63
PARIAMAN TIMUR	5948	6116	12064	5624	5950	11.574	324	166	490	95,94
KOTA PARIAMAN	30.847	31.470	62.317	28.666	30.217	58.883	2.181	1.253	3.434	94,49

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 5.2 menampilkan penduduk Kota Pariaman yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik. Menurut tabel 5.2 dapat diketahui bahwa dari 62.317 jiwa wajib KTP, sebanyak 58.883 jiwa yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik (94,49 persen).

C. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 5.3. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Per Kecamatan, Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN		JUMLAH PENDUDUK			% PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN
	ADA	TIDAK ADA	L	P	L+P	
	L+P	L+P				
PARIAMAN TENGAH	10844	19.855	15.260	15.183	30.443	35,62
PARIAMAN UTARA	6909	15.049	10.820	10.903	21.723	31,80
PARIAMAN SELATAN	6219	12.488	9.257	9.229	18.486	33,64
PARIAMAN TIMUR	6768	10.585	8.532	8.688	17.220	39,30
KOTA PARIAMAN	30.740	57.977	43.869	44.003	87.872	34,98

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 5.3 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Pariaman terhadap total penduduk Kota Pariaman. Menurut tabel tersebut terlihat bahwa Kota Pariaman yang memiliki akta kelahiran sebesar 34,98 persen (30.740 jiwa), sedangkan 57.951 penduduk tidak mempunyai akta kelahiran. Rendahnya pencapaian kepemilikan akta kelahiran disebabkan sebelum tahun 2012 pembuatan akta kelahiran masih secara manual dan tidak tersimpan di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Sampai saat ini masih dilakukan pendataan untuk mengumpulkan Dokumen Akta Kelahiran untuk diinputkan ke Database SIAK. Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Pariaman Timur paling tinggi yaitu 39,30 persen sedangkan Kecamatan Pariaman Utara yang paling rendah, yaitu 31,80 persen.

Dilihat dari kepemilikan Akta Kelahiran anak 0-18 tahun digambarkan pada tabel 5.4 dibawah ini.

Tabel 5.4. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk 0-18 Tahun Per Kecamatan, Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN		JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN			% PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN 0-18 TAHUN
	ADA	TIDAK ADA	L	P	L+P	
	L+P	L+P				
PARIAMAN TENGAH	7541	2.151	5.101	4.591	9.692	77,81
PARIAMAN UTARA	5325	1.682	3.668	3.339	7.007	76,00
PARIAMAN SELATAN	4656	1.368	3.215	2.809	6.024	77,29
PARIAMAN TIMUR	4463	1.178	2.904	2.737	5.641	79,12
KOTA PARIAMAN	21.985	6.379	14.888	13.476	28.364	77,51

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 5.4 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun Kota Pariaman. Menurut tabel tersebut terlihat bahwa anak 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sudah mencapai 77,51 persen (21.985 jiwa) dari jumlah anak 28.364 jiwa, sedangkan 6.379 anak belum memiliki akta kelahiran. Untuk mencapai target nasional tinggal 7,49 persen lagi dari 85 persen. Sampai saat ini masih dilakukan pelayanan kelapangan untuk mencapai target nasional tersebut. Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Pariaman Timur paling tinggi yaitu 79,12 persen sedangkan Kecamatan Pariaman Utara yang paling rendah, yaitu 76,00 persen.

2. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Tabel. 5.5 menyajikan kepemilikan akta perkawinan.

Tabel 5.5. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Menurut Kecamatan, Kota Pariaman, Tahun 2016

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN						JUMLAH PENDUDUK BERSTATUS KAWIN			% PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA PERKAWINAN
	ADA			TIDAK ADA			L	P	L+P	
	L	P	L+P	L	P	L+P				
PARIAMAN TENGAH	1831	1776	3607	4313	4657	8970	6144	6433	12577	40,21
PARIAMAN UTARA	1003	961	1964	3148	3437	6585	4151	4398	8549	29,83
PARIAMAN SELATAN	839	783	1622	2644	2921	5565	3483	3704	7187	29,15
PARIAMAN TIMUR	1123	994	2117	2202	2505	4707	3325	3499	6824	44,98
KOTA PARIAMAN	4.796	4.514	9.310	12.307	13.520	25.827	17.103	18.034	35.137	36,05

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 5.5 menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Pariaman yang berstatus kawin sebanyak 35.137 jiwa, terdapat 36,05 persen yang memiliki akta perkawinan dan 63,95 persen yang tidak memiliki akta perkawinan. Hal ini biasa ditemukan di seluruh Indonesia karena sebagian penduduk terutama penduduk muslim banyak yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum Negara. Hal yang sama juga dilakukan oleh penduduk non muslim seperti pemeluk agama Hindu, Budha dan Khonghucu.

3. Akta Perceraian

Akta cerai merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel 5.7 menggambarkan jumlah dan

persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta cerai di Kota Pariaman.

Tabel 5.6. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian, Kota Pariaman Tahun 2016

KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN						JUMLAH PENDUDUK BERSTATUS CERAI HIDUP			% PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA PERCERAIAN
	ADA			TIDAK ADA			L	P	L+P	
	L	P	L+P	L	P	L+P				
PARIAMAN TENGAH	19	50	69	101	237	338	120	287	407	20,41
PARIAMAN UTARA	10	27	37	73	212	285	83	239	322	12,98
PARIAMAN SELATAN	8	20	28	67	199	266	75	219	294	10,53
PARIAMAN TIMUR	16	24	40	59	125	184	75	149	224	21,74
KOTA PARIAMAN	53	121	174	300	773	1.073	353	894	1.247	16,22

Sumber : Database SIAK hasil konsolidasi dan dibersihkan Kementerian Dalam Negeri

Terlihat bahwa persentase penduduk berstatus cerai yang memiliki akta perceraian sebesar 16,22 persen dan yang tidak memiliki akta perceraian sebesar 83,78 persen. Jika dilihat menurut wilayah, maka persentase penduduk berstatus cerai dan memiliki akta perceraian tertinggi berada pada Kecamatan Pariaman Timur yaitu 21,74 persen sedangkan yang terendah di kecamatan Pariaman Selatan yaitu 10,53 persen. Besarnya penduduk cerai hidup yang tidak memiliki akta perceraian diduga penduduk berstatus cerai hidup tidak mencatatkan perceraian. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Pariaman dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian.

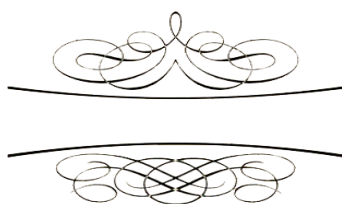
Catatan khusus terkait kepemilikan akta-akta pencatatan sipil (lahir, mati, kawin, cerai) yang ditampilkan dalam profil ini berdasar data publikasi DAK2 Semester II tahun 2016 dari Kementerian Dalam Negeri. Berdasar uji petik kajian sampel dari beberapa Kelurahan dan Desa di Kota Pariaman, realitas kepemilikan dokumen kependudukan di masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan publikasi resmi dari data kependudukan yang sudah dibersihkan dalam DAK2.

Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran penduduk bahwa pengisian formulir registrasi penduduk itu sangat penting. Hasil

kajian menemukan bahwa penduduk sebenarnya memiliki akta-akta pencatatan sipil tersebut namun tidak mencantulkannya saat registrasi / mengurus KK sehingga tidak masuk datanya dalam SIAK.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa masih juga terdapat penduduk yang memang belum memiliki dokumen-dokumen pencatatan sipil tersebut. Dengan demikian tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terutama akta-akta pencatatan sipil. Pendidikan kewargaan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi, sehingga penduduk mendokumentasikan dengan tertib dokumen bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa catatan sipil yang mereka alami, baik pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, maupun mobilitasnya.

Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana rekam data kependudukan perlu diorientasikan pada ketelitian verifikasi formulir supaya konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa. Petugas administrasi kependudukan perlu didorong menjadi juru penerang bagi penduduk untuk melakukan tertib administrasi kependudukan dnegan mencantumkan data yang benar, terbaru dan sah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Peningkatan kualitas penduduk diposisikan sebagai indikator *outcome* dari semua program kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bagian ini menyajikan kesimpulan masalah kependudukan yang dihadapi daerah berdasarkan telaahan dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

A. Kesimpulan: Tantangan Profil Kependudukan Kota Pariaman bagi Pembangunan Kota Berwawasan Kependudukan

1. Aspek Kuantitas Penduduk

- a. Peningkatan kepadatan penduduk per kecamatan di Kota Pariaman perlu mendapat perhatian, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan pembangunan. Apabila ke tiga aspek tersebut kurang diperhatikan, berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang dapat beresiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.
- b. Kepadatan penduduk per kecamatan perlu menjadi pertimbangan komponen indeks penentuan pagu anggaran pembangunan berbasis wilayah, untuk menjaga asas keadilan pembangunan. Kepadatan penduduk berimplikasi pada kebijakan rasio penyediaan fasilitas pelayanan publik dan alokasi sumber daya publik. Sebagai contoh: rasio fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk, rasio fasilitas pendidikan,

rasio petugas Linmas, fasilitas sanitasi publik, pengelolaan persampahan, penyediaan perumahan vertikal dan sebagainya.

- c. Proporsi perempuan yang besar berimplikasi pada pembangunan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Kesenjangan Gender (*Gender Inequality Index*). Usia Harapan Hidup perempuan di Kota Pariaman lebih tinggi dibanding kelompok usia laki-laki, hal ini mengindikasikan kemungkinan jumlah kepala keluarga perempuan, terutama pada kelompok berusia lanjut akan lebih besar. Keberadaan kepala keluarga perempuan (kelompok PEKA/Perempuan Kepala Keluarga) ada 19,92 persen jauh meningkat dari tahun 2015 yaitu 9,88 persen. Kelompok ini perlu menjadi target prioritas kebijakan jaminan sosial di Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan Perempuan Kepala Keluarga termasuk kategori kelompok rentan terpinggirkan dalam akses kebijakan sosial pemerintah, dan menjadi bagian dari Indikator Kesejahteraan Sosial apalagi meningkat signifikan sekali.
- d. Kelompok usia 10-19 tahun di Kota Pariaman tahun 2016 sebesar 18,98 persen. Kelompok ini sering disebut sebagai kelompok usia remaja. Kelompok ini perlu perhatian khusus di bidang pendidikan dan kesehatan mengingat akan semakin tingginya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
- e. Penduduk Kota Pariaman yang memiliki usia di atas 64 tahun sebesar 6,90 persen dengan Usia Harapan Hidup (UHH) tertinggi di Pariaman Tengah, membawa tantangan bagi kebijakan alokasi anggaran daerah untuk program kegiatan kesehatan lansia dan kebijakan jaminan sosial lansia.
- f. Mayoritas kepala keluarga laki-laki sebesar 41,12 persen berpendidikan terakhir SLTA/Sederajat, sedangkan mayoritas kepala keluarga perempuan sebesar 37,70 persen berpendidikan terakhir SD/Sederajat. Secara kasar dapat digambarkan bahwa keluarga yang dikepalai oleh

perempuan mempunyai kualitas sosial, ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih rendah dari pada keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Fenomena ini juga menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Kota Pariaman. Implikasinya, kebijakan akses pendidikan tinggi untuk perempuan perlu perhatian lebih banyak.

2. Aspek Kualitas Penduduk

- a. Pada tahun 2016 di Kota Pariaman ditemukan Angka Kematian Bayi sebesar 15,31 persen yang berarti terjadi kematian bayi sebanyak 15 bayi per 1.000 kelahiran hidup, sudah menurun dari tahun sebelumnya yaitu 22,79 persen. Angka Neonatal sebesar 12,86 persen berarti terjadi kematian 12-13 bayi sebelum berumur satu bulan atau 28 hari per 1.000 kelahiran hidup. Angka Post Neonatal sebesar 2,45 persen artinya terjadi kematian 2-3 bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup sudah jauh menurun dari tahun 2015 sebesar 14,61 persen.
- b. Dari penduduk kelompok usia 15-19 tahun, sebesar 0,26 persen sudah bekerja. Kelompok ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah, mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja. Jika dikelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka. Gejala pada kelompok umur ini perlu perhatian pemerintah Kota Pariaman untuk menurunkan persentasenya dimasa yang akan datang, dengan memperluas peluang melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi.
- c. APAK (Angka Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Pariaman sebesar 48 persen. Angka ini berarti sebesar 48 persen penduduk usia 15-64 tahun di Kota Pariaman sudah bekerja atau berusaha mencari pekerjaan dalam kegiatan produktif. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pariaman tahun 2016 sebesar 13,31 persen, hanya sedikit menurun dari

tahun sebelumnya sebesar 13,50 persen. Angka pengangguran tersebut juga menjadi PR bagi Pemerintah untuk membuka peluang kerja baru di Kota Pariaman.

3. Aspek Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Secara umum, tantangan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan memerlukan intervensi kebijakan di kalangan internal pemerintah kota dan di kalangan penduduk. Pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data kependudukan yang terintegrasi, sehingga penduduk mendokumentasikan dengan tertib dokumen bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa catatan sipil yang mereka alami, baik pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, maupun mobilitasnya.

Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana rekam data kependudukan perlu diorientasikan pada ketelitian verifikasi formulir supaya konsisten antar data dokumen pada saat melayani pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa.

Petugas administrasi kependudukan perlu disorong menjadi juru penerang bagi penduduk untuk melakukan tertib administrasi kependudukan dengan mencantumkan data yang benar, terbaru dan sah.

Selain itu, reliabilitas metode pembersihan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri yang menghasilkan DAK2 tidak dapat dipungkiri juga berpengaruh pada hasil akhir pengolahan data kepemilikan dokumen. Begitu juga dengan masa transisi perubahan sistem yang diaplikasikan untuk data administrasi kependudukan mempengaruhi hasil rekaman cakupan kepemilikan dokumen.

Secara khusus, beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian terkait aspek kepemilikan dokumen kependudukan sebagai berikut.

- a. Cakupan kepemilikan dokumen KK Kota Pariaman tahun 2016 sebesar 93,46 persen. Kepemilikan dokumen KK seringkali menjadi dasar

identifikasi kelompok sasaran program jaminan sosial. Pada beberapa kasus, posisi Kepala Keluarga yang dikepalai oleh perempuan rentan terlewatkan untuk akses berbagai program jaminan sosial. Kondisi ini menjadi prioritas pemerintah kota bagi kebijakan penentuan kelompok sasaran jaminan sosial.

- b. Persentase Perekaman KTP Elektronik sebesar 94,49 persen, cakupan perekaman KTP Elektronik sudah tinggi tetapi belum mencapai target nasional sebesar 100 persen, masih adanya penduduk kota Pariaman yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik apalagi masih banyak penduduk Kota Pariaman yang berdomisili di daerah lain tapi Dokumen kependudukannya masih di Kota Pariaman, namun sosialisasi dan kampanye sadar KTP Elektronik menjadi program prioritas, karena data KTP Elektronik merupakan data sangat penting untuk tata kelola pemerintahan dan pembangunan kependudukan pada khususnya. Strategi mendekatkan sistem pelayanan KTP Elektronik kepada penduduk (Pelayanan ke Lapangan) serta penyederhanaan prosedur pelayanan KTP Elektronik tetap menjadi prioritas rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Masyarakat belum terbiasa mengurus dokumen kependudukan yang menyangkut akta, baik kawin, cerai, kelahiran, dan kematian. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pariaman dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian. Kurangnya kesadaran mengurus kepemilikan Akta-akta tersebut rentan bagi konflik hak-hak perdatanya yang melekat sebagai konsekuensi dari peristiwa perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian.

4. Tantangan Bagi Sistem Manajemen Data dan Informasi Kependudukan

Manajemen data dan informasi kependudukan menjadi keniscayaan untuk perencanaan pembangunan daerah berwawasan kependudukan.

Tantangan yang dihadapi untuk pengarusutamaan pembangunan berwawasan kependudukan di Kota Pariaman sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasinya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan sesuai dengan indikator kinerja pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD belum optimal. Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan harus dilakukan lintas sektor. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting. Tujuan pembangunan kependudukan antara lain:
 - a. keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk;
 - b. pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya;
 - c. upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk;
 - d. peningkatan pemahaman serta pengetahuan wawasan kependudukan.

Pemahaman masyarakat akan pentingnya akurasi data kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Upaya sosialisasi dan pendidikan warga perlu terus menerus diupayakan hingga level RT/RW atau Jorong supaya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu upaya jaminan perlindungan negara semakin meningkat. Pemahaman masyarakat akan pentingnya akurasi data kependudukan dirinya dan keluarganya serta kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan supaya mencapai cakupan kepemilikan dokumen mencapai 100%. Semakin tinggi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan membantu semakin baik kualitas data informasi kependudukan. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk:

- a) mencatatkan peristiwa kelahiran;

- b) mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital (kawin, cerai, mati, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, serta pewarganegaraan;
- c) mencatatkan perubahan status kependudukan lainnya (seperti perubahan alamat ataupun perubahan nama).

Koordinasi antar lembaga berwenang mengeluarkan dokumen penduduk dan Kantor Pencatatan Sipil perlu terus menerus ditingkatkan. Pelayanan pencatatan perkawinan atau perceraian penduduk yang beragama Islam di KUA atau Pengadilan Agama (Departemen Agama); pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi oleh Departemen Kehakiman dan HAM; pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil belum seluruhnya terkoneksi antar pelayanan tersebut.

Pengendalian dan evaluasi validitas dan akurasi ketersediaan data kependudukan Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Perlu diprioritaskan pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk ragam kepentingan dan tujuan intervensi kebijakan perlu dioptimalkan. Apabila sistem informasi data kependudukan terpadu lintas sektor diaplikasikan, akan mempercepat kelengkapan, akurasi, dan uji validitas data kependudukan yang tersedia. Jika hal itu terwujud, maka akan mempermudah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

B. Implikasi Kebijakan

1. Kebijakan akurasi dan validasi kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu mengoptimalkan upaya penyajian kelengkapan data kependudukan, akurasi data dan validitas data. Dukungan lintas SKPD sangat menentukan keberhasilan penyajian kelengkapan, akurasi dan validasi data. Kelengkapan, akurasi, dan kebaruan data kependudukan sangat strategis sebagai dasar perencanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

2. Kebijakan Pengarusutamaan Pemanfaatan Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menggalakkan sosialisasi pengarusutamaan kependudukan untuk pembangunan daerah kepada seluruh SKPD kota Pariaman. Sosialisasi tentang bagaimana menyajikan data yang terkait dengan unit penduduk yang akurat dan valid serta memanfaatkannya untuk perencanaan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya sadar pentingnya mengurus dan memiliki dokumen kependudukan tepat waktu, sehingga derajat cakupan kepemilikan dokumen pendidikan meningkat.

3. Kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan isu lintas sektoral. Upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) memperpanjang waktu penundaan usia kawin;
- 2) mengatur jumlah kelahiran;
- 3) mengurangi angka kematian; dan
- 4) menjaga keseimbangan struktur penduduk.

Sektor pendidikan perlu meningkatkan angka partisipasi sekolah terutama untuk perempuan. Sektor ketenagakerjaan perlu menyusun program perluasan kesempatan kerja, terutama untuk perempuan. Perempuan pekerja di ranah publik akan berkontribusi pada penundaan usia kawin dan pengendalian jumlah kelahiran dan pengurangan beban ketergantungan rumah tangga, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk.

Sektor kesehatan perlu meningkatkan program pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keselamatan ibu melahirkan, kecukupan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kemampuan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin, dan cakupan layanan fasilitas kesehatan secara merata dan terjangkau. Sektor kesehatan berkontribusi menjaga keseimbangan struktur penduduk melalui upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup penduduk.

4. Kebijakan Penataan Ruang dan Penyediaan Sarana Prasarana Kota Berwawasan Kependudukan

Aspek kependudukan ini merupakan memegang peranan penting, karena berkaitan erat dengan upaya-upaya pengembangan dan penyebaran sarana dan prasarana kota di masa yang akan datang. Kebijakan umum pengembangan kependudukan ini meliputi dua hal, yaitu perkiraan (proyeksi) jumlah penduduk di masa yang akan datang dan distribusi kepadatan penduduk. Distribusi kepadatan penduduk artinya distribusi penduduk pada wilayah perkotaan yang sudah ditetapkan. Proyeksi kepadatan maksimal penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu perlu dijadikan rujukan merencanakan daya tampung dan daya dukung wilayah. Pengendalian penyebaran penduduk melalui kebijakan pengaturan wilayah pemukiman penduduk dan model pembangunan perumahan menjadi hal yang urgen.

5. Kebijakan Ketahanan Pangan

Proyeksi pertumbuhan penduduk menjadi pertimbangan untuk perencanaan cadangan pangan daerah dan penyediaan sumber kebutuhan energi protein.

6. Kebijakan kesehatan

Penduduk kota Pariaman tahun 2016 termasuk kategori umur tua, karena umur median penduduk lebih dari 30 tahun, yaitu 34 tahun. Setengah dari penduduk Kota Pariaman pada tahun 2016 berusia di bawah 34 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 34 tahun. Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan menyusun kebijakan jaminan kesehatan lansia.

Tantangan Bonus Demografi berimplikasi pada prioritas program dan kegiatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan promotif berorientasi pada kegiatan yang bersifat promosi kebiasaan hidup sehat. Sedangkan Pelayanan kesehatan preventif fokus pada kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan promotif dan kuratif untuk mengurangi resiko angka kesakitan dan angka kematian.

Pelayanan kesehatan promotif dan preventif terutama untuk usia muda, dimaksudkan supaya tumbuh generasi yang sehat dan cerdas. Generasi yang berkualitas tahun 2020-2031(puncak bonus demografi) sangat diperlukan supaya Kota Pariaman memiliki angkatan tenaga kerja yang unggul dan menang berkompetisi di pasar kerja era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

7. Kebijakan pendidikan

Jumlah penduduk usia 10-19 tahun, berjumlah 18,98 persen, perlu perhatian khusus sebagai pemanfaatan bonus demografi pada tahun 2020-2031. SKPD yang menangani urusan pendidikan perlu memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan dan pendidikan kecakapan hidup di jenjang pendidikan dasar sebagai modal bersaing di pasar kerja era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

8. Kebijakan ketenagakerjaan

Data tentang angkatan kerja yang belum bekerja menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan memberi input untuk perencanaan kebijakan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu SKPD yang mengampu urusan ketenagakerjaan perlu menyusun perencanaan kegiatan penanganan pengangguran berbasis data angkatan kerja berdasar kelompok usia dan gender.

9. Kebijakan sosial

Data penduduk menurut kecacatan, perceraian dan perempuan kepala rumah tangga, memberi input bagi kebijakan penanganan penyandang masalah sosial dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

